

Silvika

Revolusi Mental Untuk Kualitas SDM yang Lebih Baik

PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK UNTUK BUDIDAYA MAGGOT BLACK SOLDIER FLY (BSF)



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Daftar Isi

NASKAH ILMIAH

Pendekatan <i>Design Thinking</i> untuk Inovasi Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan <i>Ai Yuniarsih</i>	3
Identifikasi Gaya Belajar Peserta Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat Angkatan IV di Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda <i>Dwi Rama Nugraha</i>	12
Pengembangan Kurikulum Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan <i>Elok Budiningsih</i>	18
Uji Kompetensi Keahlian Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Hutan sebagai Proses Pembuktian Kemampuan bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2022 (Studi Kasus Sekolah Menengah Kejuruan Widya Nusantara Maros Sulawesi Selatan) <i>Ida Nurmayanti</i>	28
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Hutan Hak <i>Imam Safari Hidayat</i>	35

WARTA DIKLAT

Training of Trainers (ToT) Substansi Pelatihan	43
Pelatihan Pengolahan Sampah Organik untuk Budidaya Maggot <i>Black Soldier Fly</i> (BSF)	44
Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANIS-PH)	45
Pelatihan Interpreter Wisata Alam	47
<i>Workshop</i> Penyusunan Panduan <i>Coaching</i> dan <i>Mentoring</i>	48
Pelatihan Pembentukan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)	49
<i>Workshop</i> Pengembangan SMK Kehutanan Tahun 2022	50

ANEKA INFORMASI

Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama	51
Apel Pagi Pusat Diklat SDM LHK	52
Purna Bakti	53
Berita Duka Cita	54

Dewan Redaksi



Pembina
Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si



Pimpinan Redaksi
Dr. Anna Indria Witasari, M.Sc



Sekretaris Redaksi
Esi Fajriani, S.Hut., M.Si



Anggota
Dr. Sri Harteti, S.Pi., M.Si



Anggota
Ir. Antung Deddy R., MP



Anggota
Ekasari Nurhidayanti, S.Si., M.Si



Anggota
Ani Marianah, S.Hut., M.I.L



Anggota
Elok Budiningsih, S.Hut., M.Si

Sekretariat Redaksi



Koordinator Redaksi
Denni Rasyid, SE., M.Si



Anggota
Galuh Astika, S.Hut., M.Ak



Anggota
Tulus Maulana, SE



Anggota
Desti Putri H, A.Md

Dari Redaksi

Salam Jumpa dengan **SILVIKA** Edisi 106 Tahun 2022. Pada kesempatan ini Dewan Redaksi menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian dan kiriman naskah ilmiah/artikel dari para penulis.

Redaksi menampilkan beberapa karya tulis ilmiah yang sangat menarik diantaranya: Pendekatan *Design Thinking* untuk inovasi pengarusutamaan gender pada lembaga pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan. Identifikasi gaya belajar peserta pelatihan tenaga teknis pengelolaan hutan pengujian kayu bulat angkatan IV di Balai Diklat LHK Samarinda, Pengembangan kurikulum pelatihan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari pembinaan hutan, Uji Kompetensi keahlian bidang teknis konservasi sumber daya hutan sebagai proses pembuktian kemampuan bagi siswa sekolah menengah kejuruan kehutanan Tahun 2022, Penatausahaan hasil hutan kayu HAK. Tulisan lainnya berupa informasi pelatihan kewirausahaan bagi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pelatihan Teknis Pembangunan Infrastruktur Pembahasan Gambut bagi Masyarakat dan Tenaga Lapang yang terangkum dalam rubrik warta diklat dan aneka informasi. Harapannya semoga majalah ini bisa memberikan inspirasi, motivasi dan pengembangan diri dalam berkarya.

Bagi pembaca yang ingin mengirimkan karya tulis ilmiahnya ke Redaksi Majalah Silvika, dapat mengikuti sistematika penulisan yang dipersyaratkan oleh Redaksi Majalah Silvika (terlampir di halaman belakang). Jangan lupa untuk cantumkan nomor telpon/HP yang dapat dihubungi untuk memperlancar komunikasi. Naskah ilmiah yang dikirim ke Redaksi Majalah Silvika adalah tulisan yang belum pernah dikirim/dimuat pada majalah lain.

Akhir kata redaksi mengucapkan SELAMAT MEMBACA...

- Salam Redaksi -

SILVIKA

DEWAN REDAKSI

Pembina

Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si

Pemimpin Redaksi

Dr. Ir. Anna Indria Witasari, M.Sc

Sekretaris Redaksi

Esi Fajriani, S.Hut., M.Si

Anggota Redaksi

Dr. Sri Harteti, S.Pi., M.Si

Ir. Antung Deddy R., MP

Eka Sari Nurhidayati, S.Si, M.Si

Ani Marianah, S.Hut., M.I.L

Elok Budiningsih, S.Hut., M.Si

SEKRETARIAT

Koordinator Redaksi

Denni Rasyid, SE., M.Si

Anggota Sekretariat

Galuh Astika, S.Hut., M.Ak

Tulus Maulana, SE

Desti Putri H, A.Md

Alamat Redaksi

Jalan Mayjen Ishak Juarsa

Gunung Batu Kotak Pos 141

Bogor 16118

Telp. (0251) 8313622, 8337742 Ext.112

Fax. (0251) 8323565

Email : majalahsilvika@gmail.com

🌐 <http://pusdiklat.bp2sdm.menlhk.go.id>

📘 pusdiklat Sdm Lhk

📷 @pusdiklatsdmLhk

PENDEKATAN *DESIGN THINKING* UNTUK INOVASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA LEMBAGA PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Oleh:

AI YUNIARSIH

Widyaiswara Ahli Madya, Balai Diklat LHK Kadipaten

ABSTRACT

The Indonesian Ministry of Environment and Forestry received an award in the implementation of gender mainstreaming. Therefore, more innovation is needed to maintain gender mainstreaming practices in the environment and forestry sector, including at training institutions. Training institutions have main task and function to develop the competence of human resources, which in carrying out their duties still require gender mainstreaming innovations. Gender mainstreaming innovations use social innovation approaches, including design thinking approaches. This study aims to introduce the design thinking approach and how it can be applied in gender mainstreaming innovations at the Ministry of Environment and Forestry training institutions. The research method in this study is a review of related document libraries. The type of data collected is secondary data, which is obtained by reviewing documents on gender mainstreaming regulations, design thinking method, training cycle and others related to this study. Design thinking approach can be applied in training cycle activities, especially in training need analysis and training design. This approach is used by looking at exactly what users' need, in this case human resources of the Ministry of Environment and Forestry that consist of civil servants and non civil servants (communities), men and women, including people with disabilities. By using design thinking approach, it is expected that training innovations are produced in accordance to user needs. In addition, they can support the implementation of gender mainstreaming in the environment and forestry sector.

Keywords: *design-thinking, gender-mainstreaming, innovation, training*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengarusutamaan Gender (PUG) mulai dikenal luas di Indonesia sejak terbitnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 yang menginstruksikan setiap elemen pemerintahan untuk mengintegrasikan gender pada setiap kegiatan. Kesetaraan gender (*Gender Equality*) juga menjadi tujuan kelima dari SDGs (*Sustainable Development Goals*). Meskipun sedang terjadi perkembangan kesetaraan gender yang masif belakangan ini, namun diskriminasi terhadap gender terutama perempuan masih menjadi permasalahan di berbagai negara. Memperjuangkan kesetaraan gender dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang pesat, memerintah dengan efektif, dan mengentaskan kemiskinan.

Terbitnya Peraturan Menteri LHK No. 31/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mendorong percepatan PUG di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kementerian LHK sudah 6 (enam) kali memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dimulai dari Kategori Pertama pada Tahun 2011, kemudian Kategori Madya pada Tahun 2012 dan 2013, Kategori Utama pada Tahun 2016, hingga Kategori Mentor pada Tahun 2018 dan 2021. Anugerah Parahita Ekapraya adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas komitmennya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berbagai upaya terkait pengarusutamaan gender telah dilakukan oleh Kementerian LHK, yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) PUG Kementerian LHK, diantaranya adalah menyelenggarakan kegiatan Workshop PUG, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta menyelenggarakan lomba pelaksanaan PUG di setiap eselon 1 Kementerian LHK. Beberapa inovasi PUG telah diluncurkan oleh Pokja PUG Kementerian LHK pada tahun 2021 dengan adanya Festival Gender Kementerian LHK meliputi: pelaksanaan Pelatihan GLEADS (*Gender Leader Summit*) yang diikuti oleh para pejabat di unit eselon 2 dan 3, TEACH (*Training for Ecogender Activating Champions Hub*) secara masif dengan metode *distance learning*, serta lomba pelaksanaan PUG bertajuk GENERATION (*Gender Mainstreaming Competition*) untuk instansi LHK di pusat dan juga di daerah. Penilaian lomba GENERATION terdiri atas 7 prasyarat PUG yaitu: Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya, Data Terpilah, Alat analisis, dan Partisipasi Masyarakat. Ketujuh prasyarat tersebut diperkuat dengan implementasi PUG dan inovasi yang sudah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir.

Fakta bahwa Kementerian LHK telah beberapa kali memperoleh penghargaan APE bahkan sudah pada kategori mentor mendorong Kementerian LHK untuk tetap mempertahankan posisi tersebut atau bahkan meningkatkan kinerja penerapan PUG nya melalui inovasi-inovasi PUG pada setiap eselon dan unit-unit pelaksana teknisnya, tidak terkecuali inovasi PUG pada lembaga pelatihan Kementerian LHK.

Lembaga pelatihan LHK memiliki tugas pokok dan fungsi mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) LHK. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga pelatihan LHK berprinsip *Human Centre*. Oleh karena itu, lembaga pelatihan LHK masih memerlukan inovasi-inovasi PUG yang dapat dihasilkan dengan metode-metode pendekatan inovasi sosial, diantaranya dengan pendekatan *design thinking*.

Kebutuhan pengguna menjadi faktor utama perhatian pengarusutamaan gender, karena laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda sehingga kegiatan di lembaga pelatihan yang terdiri dari: penentuan kebutuhan pelatihan, merancang pelatihan, mengembangkan material

pelatihan, melaksanakan pelatihan, dan mengevaluasi pelatihan, termasuk penataan sarana prasarana pelatihan harus memperhatikan kebutuhan pengguna.

B. Rumusan/Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang kajian tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah SDM tenaga pelatihan pada lembaga pelatihan LHK sudah mengenal pendekatan *design thinking* untuk menghasilkan inovasi pelatihan?
2. Bagaimana penerapan pendekatan *design thinking* untuk menghasilkan inovasi pada aktivitas siklus pelatihan?

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan karya tulis adalah memperkenalkan salah satu metode pendekatan yang menghasilkan inovasi sosial yaitu *design thinking* dan menerapkannya pada aktivitas siklus pelatihan. Dengan metode pendekatan *design thinking* diharapkan akan menghasilkan inovasi-inovasi pelatihan untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender pada lingkup Kementerian LHK.

II. METODE PENELITIAN

Kajian tentang pendekatan *design thinking* untuk menghasilkan inovasi PUG pada lembaga pelatihan LHK dilaksanakan selama rentang waktu 2 (dua) bulan, dimulai pada minggu ketiga Bulan April sampai dengan pertengahan Bulan Juni 2022.

Metode yang digunakan pada karya tulis ini adalah kajian pustaka dari dokumen terkait peraturan dan publikasi PUG. Data pustaka yang dikumpulkan menjadi bahan untuk penulisan naskah karya tulis yang menguraikan gagasan tentang Pendekatan *design thinking* yang diterapkan pada siklus pelatihan sehingga dapat menyimpulkan mengenai inovasi pelatihan yang responsif gender sesuai dengan kebutuhan *user*. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder, yang diperoleh dengan menelaah dokumen tentang peraturan dan publikasi PUG, metode *design thinking*, siklus pelatihan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kajian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi dan Pengarusutamaan Gender

Menurut Wikipedia, inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial).

Secara tradisional, inovasi dalam dunia bisnis berarti mencari solusi teknologi baru. Namun, pada tahun 1990-an saat diseminasi TQM (*Total Quality Management*) Filosofi Manajemen yang diciptakan oleh Deming (1986) dengan maksud melakukan perbaikan berkelanjutan dalam proses dan produk yang berkualitas, lahirlah pendekatan baru inovasi. Inovasi tidak hanya diperlukan untuk menemukan solusi teknologi baru, tetapi juga mengeksplor pasar-pasar baru, menciptakan bentuk komunikasi baru dengan *customer*, dan pendekatan untuk memuaskan kebutuhan konsumen (Vianna *et al.*, 2012).

Sementara itu, Pengarusutamaan Gender (PUG) muncul sebagai strategi untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan akibat dari pembangunan yang netral gender dan bias gender. Disisi lain, persoalan yang dihadapi dan pengalaman untuk perempuan dan laki-laki dalam pembangunan berbeda, masing-masing memiliki kebutuhan spesifik sesuai dengan kapasitasnya.

Pada perkembangannya, pelaksanaan PUG sudah tidak terbatas pada upaya untuk menghapus kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, namun juga meningkatkan inklusi sosial kelompok marginal lainnya dan juga mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017.

Ada keterkaitan antara inovasi dan PUG. PUG merupakan strategi untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat

pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi untuk mendukungnya, misalnya inovasi dalam hal perbaikan proses atau sistem, menciptakan atau memperbaiki produk/program barang atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh penggunanya.

B. Konsep Pendekatan *Design Thinking* untuk Menghasilkan Inovasi

Design thinking adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah secara praktis dan kreatif dengan fokus utama pada pengguna. Jadi, dalam pemecahan masalah, desainer akan berusaha memahami apa kebutuhan pengguna (manusia) dan menghasilkan solusi paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. *Design thinking* meyakini (dan telah terbukti) bahwa orang-orang yang menghadapi masalah adalah mereka yang memegang kunci untuk jawaban masalahnya.

Kunci untuk prosesnya adalah empati dengan pengguna untuk mengetahui kebutuhan yang belum terpenuhi oleh mereka dengan memahami keyakinan, nilai-nilai, motivasi, perilaku, penderitaan, pencapaian dan tantangan, serta menyediakan konsep solusi yang inovatif (Hwa *et al.*, 2017).

Penerapan konsep *design thinking* di dunia pendidikan telah berlangsung di berbagai belahan dunia, seperti di Stanford University melalui *Hasso Plattner Institute of Design* (HPI) melatih *design thinking* para guru K-12 agar mereka dapat meningkatkan pembelajaran dan mempromosikan pemikiran kreatif, kerja tim, dan tanggung jawab siswa untuk belajar pendekatan berbasis desain untuk pengajaran dan pembelajaran inovatif telah berkembang luas (Anonim, 2020).

Konsep *design thinking* juga merupakan subjek yang telah berlangsung di Indonesia, antara lain diterapkan sebagai metode untuk inovasi bisnis, contoh penciptaan aplikasi Gojek. Di dunia pendidikan di Indonesia terlihat bahwa konsep *design thinking* diterapkan bagi pengembangan rencana program dan pembelajaran kreatif dalam kurikulum berbasis kompetensi. Di antaranya metode *design thinking* diterapkan pada mata kuliah desain pengembangan produk pangan (Darmalaksana, 2020).

Konsep *design thinking* juga diterapkan di Indonesia dan negara-negara lain. Pada saat pandemi

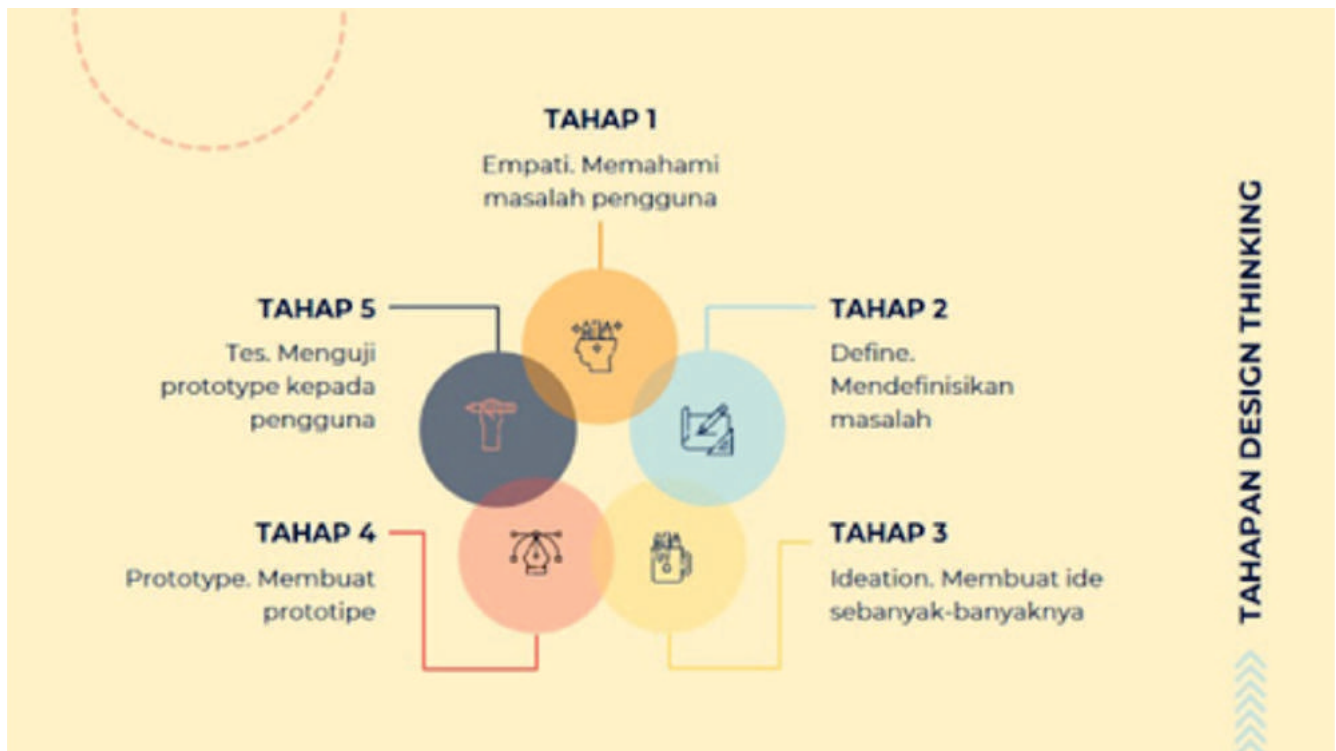
covid-19, dunia pendidikan dan pelatihan berupaya keras menghasilkan inovasi metode pendidikan dan pelatihan secara elektronik (*e-learning*) yang bisa diakses tanpa harus bertatap muka langsung.

Dunia pendidikan dan pelatihan berupaya keras menghasilkan inovasi metode pendidikan dan pelatihan secara elektronik (*e-learning*) yang bisa diakses tanpa harus bertatap muka langsung. Dengan demikian, pembelajaran masih dapat berlangsung dengan baik dan siapapun yang membutuhkan pelatihan untuk pengembangan kompetensi memiliki kesempatan yang memadai.

Design thinking ini diawali dan digagas oleh pendiri IDEO yaitu David Kelley dan Tim Brown. IDEO sendiri merupakan lembaga konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi. Tujuan diciptakannya *design thinking* oleh David Kelley dan Tim Brown tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah dengan berfokus pada kebutuhan pengguna.

IDEO menyatakan bahwa *design thinking* ini merupakan penyatuan harapan dari sudut pandang manusia dan sudut pandang teknologi yang memiliki kelayakan dan nilai ekonomis. Namun untuk menerapkannya seseorang perlu mengerahkan kreativitas mereka agar ide serta solusi yang didapatkan benar-benar mampu menyelesaikan masalah (Anonim, 2019).

Munggoro (2021) menyatakan bahwa pendekatan *design thinking* sangat tepat digunakan untuk menghasilkan inovasi sosial, karena dunia terus berkembang, teknologi terus berubah-ubah. Demikian juga dengan kebutuhan manusia yang selalu berubah mengikuti perkembangan jaman. Maka, bisa jadi solusi permasalahan saat ini dapat menjadi masalah di masa depan. Kunci *Design Thinking* adalah: *Human Center, Many Process Method*, dan *Not Linear* (sangat dinamis). Tahapan *Design Thinking* dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Tahapan *Design Thinking*
sumber: <http://www.terasacademy.com/2020/08/panduan-menggunakan-design->

Berikut ini adalah penjelasan kelima tahapan *design thinking* untuk menghasilkan suatu inovasi, yang dirangkum dari beberapa referensi.

Tahap 1. *EMPATHIZE/EMPATI*

Pada tahap ini, untuk memperoleh data permasalahan, dengan pertimbangan menghilangkan bias, kita harus bisa mengesampingkan asumsi agar kita dapat mengumpulkan *insight* sebanyak mungkin tentang pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan:

1. *Observasi* (mendengar, melihat, merasakan, mencatat).
2. *Immerse* (“Blusukan” untuk memperoleh permasalahan yang benar-benar ada).
3. *Engage* (langsung kontak/berkomunikasi dengan pengguna).

Dengan demikian, dapat diperoleh data dan rasa yang betul-betul dibutuhkan pengguna.

Tahap 2. *DEFINE/MENDEFINISIKAN*

Ketika mendefinisikan sebuah masalah, kita harus tetap fokus pada kebutuhan pengguna bukan kepada *business goals*. Tahap ini bertujuan untuk menggali peluang tersembunyi. Hal ini dapat dilakukan dengan:

1. *Unboxing* (melakukan reframing, basisnya adalah impian tentang terwujudnya sesuatu yang diinginkan untuk mengatasi masalah).
2. *Insight* (melihat dan mendengar lebih dalam lagi).
3. *Needs* (mengidentifikasi jenis kebutuhan yang diinginkan pengguna).
4. *Synthesize* (mensintesis permasalahan kebutuhan pengguna).

Sehingga dihasilkan suatu pernyataan tentang kondisi permasalahan yang ada, menghubungkannya dengan kebutuhan pengguna dan disintesis secara netral atau *nature gender*.

Tahap 3. *IDEATE/IDEASI*

Setelah memahami apa masalah pengguna dan menganalisis informasi-informasi tersebut, saatnya menghasilkan ide-ide solutif yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang sudah didefinisikan sebelumnya.

Tahapan ini juga perlu dilakukan untuk menghasilkan sebanyak mungkin sudut pandang serta ide-ide baru. Tahap ini bertujuan mengeksplorasi gagasan baru. Mengeksplorasi gagasan baru dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti *mind mapping*, *brainstorming*, atau FGD (*Focus Group Discussion*). Komponen kegiatannya meliputi:

1. *Generate* (memperbaharui tahapan atau proses tertentu).
2. *Diversity* (memperoleh keragaman ide).
3. *Quantity* (memperoleh ide sebanyak-banyaknya, yang utama adalah jumlahnya. Tidak perlu menilainya dulu).

Dari banyaknya ide yang dikumpulkan, pada akhir tahap ini perlu mengevaluasi masing-masing ide tersebut untuk menemukan gagasan terbaik.

Tahap 4. *PROTOTYPE/PROTOTIPE*

Tahap keempat dalam *design thinking* adalah membuat *prototype*. Secara garis besar, *prototype* merupakan produk yang akan dikembangkan dengan versi yang diperkecil, atau juga bisa dikatakan sebagai versi simulasi atau sampel. Dengan *prototype* ini *designer* dapat menguji ide dan desain yang dibuat. Pada Tahapan ini, disusun suatu gagasan untuk perubahan. Komponen kegiatannya berupa:

1. *Explore* (mencari bentuk-bentuk gagasan, misalnya: animasi, maket, proposal, *storytelling*, videografi).
2. *Convert* (mengkonversi dari bentuk gagasan yang sudah ada atau perpindahan kepada sesuatu gagasan baru).
3. *Inspire* (gagasannya harus menginspirasi).

Pada penyusunannya, dapat terjadi *review* atau pengerjaan gagasan yang berulang-ulang atau bolak-balik, sehingga menghasilkan gagasan yang terbaik.

Tahap 5. *TEST/PENGUJIAN*

Pada tahap ini, setelah gagasan dipublikasikan, maka dilakukan tes atau pengujian. Pada tahap ini bisa dilihat bagaimana target pengguna berinteraksi dengan *prototype* yang sudah dibuat sebelumnya.

Selain itu, tahap pengujian juga menghasilkan *feedback* yang berharga untuk meningkatkan performa dari produk tersebut. Pengujian ini perlu dilakukan untuk mendeteksi kesalahan dan masalah kegunaan sejak awal. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa tahap pengujian ini tidak selalu menjadi tahap terakhir dalam *design thinking*. Hal tersebut terjadi karena setelah melalui proses pengujian, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang tidak terpikirkan sebelumnya sehingga harus kembali lagi ke tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap pengujian ini, diperlukan kemampuan menyaring, memperbaiki atau memecahkan masalah berdasarkan umpan balik, serta kemampuan belajar cepat mengatasi masalah berdasarkan masukan atau umpan balik.

C. Penerapan *Design Thinking* untuk Inovasi Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pelatihan

Kementerian LHK berupaya mempercepat implementasi pengarusutamaan gender di setiap institusi di Kementerian LHK. Lembaga pelatihan LHK khususnya senantiasa harus responsif gender dalam setiap kegiatannya. Implementasi responsif gender adalah dengan memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil bagi SDM LHK, baik laki-laki maupun perempuan, baik ASN ataupun Non ASN. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 203 ayat (3) dan (4) serta Peraturan LAN RI No. 10 Tahun 2018 pada Pasal 4 ayat(2).

Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikuti sertakan dalam pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi bagi PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS. Pengembangan kompetensi SDM LHK non ASN juga harus menjadi perhatian lembaga pelatihan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, yang mungkin sering merasa termarginalkan karena tidak diberikan akses dan manfaat dari lembaga pelatihan.

Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, lembaga pelatihan LHK memiliki sistem pelatihan mengikuti desain siklus pelatihan model A-D-D-I-E yaitu *Analysis* (Analisis Kebutuhan Pelatihan), *Design* (Desain/Perancangan pelatihan), *Development* (pengembangan material pelatihan), *Implementation* (implementasi pelatihan), dan *Evaluation* (evaluasi pelatihan). Pendekatan *design thinking* dapat diterapkan pada siklus pelatihan, khususnya dalam kegiatan analisis kebutuhan pelatihan dan desain pelatihan.

Pada tahap analisis kebutuhan pelatihan, pendekatan pertama dari *design thinking* yaitu empati dapat diterapkan dengan cara menggali permasalahan yang masih dialami oleh pengguna. Penggalan informasi pada Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) memerlukan waktu yang cukup banyak apalagi ketika dilakukan dengan cara “blusukan”, observasi, dan melakukan komunikasi dengan pengguna. Pada tahap ini petugas yang melakukan Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) selayaknya memiliki empati akan kondisi permasalahan yang dialami pengguna, khususnya yang berkaitan dengan ketidakmampuan mereka dalam mengatasi permasalahan yang berada di lingkungannya. Dengan menerapkan empati, maka petugas AKP akan ikut merasakan peliknya permasalahan dan memperoleh data yang mendukung untuk ditindaklanjuti. Di bawah ini adalah contoh hasil pendekatan *empathize* hasil observasi dan hasil berkomunikasi pada saat AKP sebagai berikut:

1. Hasil observasi di lingkungan desa sekitar KHDTK (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus) masih terdapat tumpukan sampah, baik sampah organik ataupun yang anorganik. Sampah tersebut tercecer dimana-mana dan menimbulkan bau busuk yang mengganggu serta menutup saluran-saluran air. Hal tersebut menyebabkan banjir pada saat hujan.
2. Hasil komunikasi dengan beberapa warga desa, diantaranya Kepala Desa, Ketua RT, Ketua KTH, beberapa kepala keluarga, dan beberapa ibu rumah tangga, diperoleh data bahwa mayoritas masyarakat desa sekitar KHDTK masih belum mengerti pengelolaan sampah yang benar, khususnya kaum ibu yang biasa memproduksi sampah dapur setiap hari.

Setelah memperoleh data dengan pendekatan empati, maka tahap *Define* atau mendefinisikan dilaksanakan, contohnya sebagai berikut: masyarakat desa sekitar KHDTK masih belum mengerti pengelolaan sampah yang baik. Sehingga masih terjadi banjir ketika musim hujan karena banyak saluran air yang tertutup oleh sampah.

Pada tahap mendesain/merancang pelatihan, diterapkan pendekatan *Ideate*, yaitu menggali ide/gagasan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh gagasan paling tepat dalam mengatasi permasalahan yang telah didefinisikan di atas. Contoh pendekatan ideasi adalah dengan menggunakan *mind-mapping*, *brainstorming* atau FGD (*Focus Group Discussion*) bersama-sama dengan pengguna. Dalam hal ini adalah masyarakat desa. Contoh hasil FGD, misalnya diperoleh beberapa ide/gagasan:

1. Masyarakat desa diberikan pelatihan pengelolaan sampah.
2. Masyarakat desa diberikan penyuluhan rutin tentang pengelolaan sampah.
3. Masyarakat desa diberikan bimbingan teknis membentuk bank sampah.
4. Masyarakat desa diberikan pelatihan pembuatan pupuk dari sampah organik.
5. Masyarakat desa diberikan keterampilan membuat kerajinan dari sampah anorganik.

Dengan memperoleh ide-ide tersebut, maka kemudian di tahap ideasi ini dipilih ide yang dirasa paling tepat yang disepakati oleh pengguna, contohnya: masyarakat desa diberikan pelatihan pengelolaan sampah melalui bank sampah.

Pada pendekatan *Prototype*, tim dari Lembaga Pelatihan LHK kemudian membuat bentuk konkrit hasil ideasinya, misalnya dalam bentuk Kurikulum Pelatihan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah Bagi Masyarakat. Kurikulum ini harus melalui beberapa tahap pembahasan sehingga akan dihasilkan kurikulum final.

Selanjutnya setelah kurikulum final di luncurkan maka dilakukan pendekatan Test/Pengujian, misalnya diaplikasikan pada salah satu kelompok masyarakat desa, untuk memperoleh *feedback* apakah kurikulum sudah tepat sasaran dan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada tahap ini dilakukan evaluasi apakah masih ada yang harus diperbaiki, apakah konten materinya ditambah atau dikurangi, apakah metode penyampaian materinya sudah tepat. Pada tahap ini tidak menutup kemungkinan ada perombakan kembali kurikulumnya berdasarkan umpan balik dari pengguna. Setelah melalui beberapa tahapan tersebut, maka inovasi pelatihan berupa kurikulum baru berdasarkan kebutuhan pengguna terbentuk.

Setelah selesai tahap inovasi berupa kurikulum, tidak menutup kemungkinan akan diikuti inovasi-inovasi selanjutnya, misalnya inovasi pembentukan bank sampah yang dikelola oleh masyarakat desa sekitar KHDTK dengan bimbingan teknis rutin dari Lembaga Pelatihan LHK, atau inovasi pertanian sehat pada masyarakat desa sekitar KHDTK dengan memanfaatkan pupuk dari sampah organik, dan sebagainya.

Inovasi pelatihan yang memperhatikan kebutuhan pengguna tersebut adalah salah satu bentuk dukungan terhadap implementasi pengarusutamaan gender pada lingkup Kementerian LHK, karena Lembaga pelatihan LHK juga memiliki kepedulian akan perbaikan ekosistem dan pengembangan kompetensi masyarakat sekitar hutan. Masyarakat disini terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang memiliki kebutuhan, pengalaman atau aspirasi yang berbeda, dan itu harus dipertimbangkan ketika akan memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara adil dan setara. Hal ini juga berlaku bagi para ASN Kementerian LHK, tidak terkecuali untuk ASN pada Lembaga Pelatihan LHK itu sendiri. Mereka dapat diberikan kesempatan mengembangkan kompetensinya sesuai kebutuhannya. Hal ini karena untuk menghasilkan SDM LHK unggul melalui pelatihan diperlukan tenaga-tenaga kepelatihan yang kreatif dan inovatif.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Design thinking memiliki 5 (lima) tahapan yaitu *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype* dan *test* yang saling berkaitan. *Design thinking* memudahkan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk menghasilkan inovasi, khususnya inovasi sosial, termasuk inovasi pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pelatihan LHK.

Pendekatan *design thinking* dapat diterapkan pada siklus pelatihan, untuk menghasilkan inovasi pelatihan yang responsif gender, khususnya pada kegiatan analisis kebutuhan pelatihan (AKP) dan desain pelatihan. Hasil Penerapan *design thinking* pada AKP yaitu tahap *empathize* untuk memperoleh data dan rasa permasalahan yang terjadi di lingkungan pengguna, kemudian pada tahap *define* dengan mendefinisikan permasalahan yang benar-benar dibutuhkan untuk diatasi, bersumber dari pandangan pengguna. Tindak lanjut dari hasil *define* pada tahap mendesain pelatihan yaitu penerapan *Ideate* untuk menggali ide sebanyak-banyaknya dari pengguna hingga mendapatkan ide pilihan yang disepakati untuk dibuat *prototype* nya. Setelah berulang kali dilakukan pembahasan, *prototype* yang dibuat diujicobakan kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Proses ini tidak berhenti sampai pada tahap uji coba. Karena *design thinking* bersifat sangat dinamis, maka penyempurnaan bisa dilakukan berulang kali hingga dihasilkan inovasi pelatihan yang benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna.

Dalam rangka menciptakan inovasi pengarusutamaan gender pada lembaga pelatihan, maka personil lembaga pelatihan LHK, baik Pejabat Kepemimpinan Administrasi, Pejabat Kepemimpinan Pengawas, Pejabat Fungsional (Widyaiswara, Penyuluh, Penggerak Swadaya Masyarakat, Pengembang Teknologi Pembelajaran, dan lain-lain) perlu memahami alur pendekatan *design thinking* untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

B. Rekomendasi

Lembaga pelatihan LHK bertugas mengembangkan kompetensi SDM Kementerian LHK, baik ASN maupun non ASN, laki-laki ataupun perempuan, termasuk kaum disabilitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Pengembangan inovasi pelatihan yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna adalah salah satu bentuk dukungan terhadap implementasi pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian LHK.

Dalam rangka menciptakan inovasi pengarusutamaan gender pada lembaga pelatihan,

maka personil lembaga pelatihan LHK, baik Pejabat Kepemimpinan Administrasi, Pejabat Kepemimpinan Pengawas, Pejabat Fungsional (Widyaiswara, Penyuluh, Penggerak Swadaya Masyarakat, Pengembang Teknologi Pembelajaran, dan lain-lain) perlu memahami alur pendekatan *design thinking* untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2019. Teori *Design Thinking* oleh Tim Brown From IDEO. Diakses pada 3 Juni 2022 *melalui* <https://binus.ac.id/bandung/2019/12/tes>
- Anonim. 2020. Panduan Menggunakan *Design Thinking* untuk Inovasi (Edisi Lengkap). Diakses pada 11 Juni 2022 *melalui*: <http://www.terasacademy6.com/2020/08/pan-duan-menggunakan-design->
- Anonim. 2022. Berfikir Lateral. Diakses pada 8 Juni 2022 *melalui*: <https://www.putra-putri-indonesia.com/berpikir-lateral.html>.
- Darmalaksana, W. 2020. Metode *Design Thinking* Hadis: Pembelajaran, Riset & Partisipasi Masyarakat. ISBN 978-623-7166-44-3 (PDF). Penerbit: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hwa, L.C. *et al.* 2017. *Design Thinking The Guide Book*. Royal Civil Service Commission.
- KemenLHK. 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- LAN. 2018. Peraturan Lembaga Administrasi Negara-RI No 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS.
- Masaharu, W. 2021. Hasilkan ASN Unggul, Lembaga Pelatihan Harus Inovatif. Diakses pada 2 Juni 2022 *melalui*: <https://www.beritasatu.com/archive/866733/hasilkan-asn-unggul-lembaga-pelatihan-harus-inovatif>.
- Munggoro, D. F. 2021. *Design Thinking* untuk Inovasi Sosial. Bahan Paparan Kelas TEACH #5. Tanggal 12 November 2021. Festival Gender Kementerian LHK 2021.

- Pemerintah Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Pemerintah Indonesia. 2000. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.
- Vianna, M. *et al.* 2012. *Design Thinking: Business Innovation [electronic resource] translated by Bruno Murtinho*. Rio de Janeiro: MJV Press, 2012. 164p., digital resource.
- Wahyudi, M.D. 2021. Mengoptimalkan Pelatihan Melalui Desain Pembelajaran Model ADDIE. Diakses pada 10 Mei 2021 melalui: <https://ilmu.lpkn.id/2021/02/15/mengoptimalkan-pelatihan-melalui-desain-pembelajaran-model-addie/>
- Wijayanto, A.M. *et al.* 2021. Penerapan Metode *Design Thinking* Dalam Rancang Aplikasi Penanganan Laporan Pencurian Barang Berharga Di Polsek Sukmajaya. JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) Volume 06, Nomor 02, Desember 2021: 267-276.
- Wulandari, T. 2022. Pengertian Kreatif, Ciri-ciri, dan Cara Mengembangkan Kreativitas. Diakses pada 7 Juni 2022 melalui: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5989447/pengertian-kreatif-ciri-ciri-dan-cara-mengembangkan-kreativitas>.



"Orang yang tahu cara bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup"

Steve Marabali



IDENTIFIKASI GAYA BELAJAR PESERTA PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PENGUJIAN KAYU BULAT ANGKATAN IV DI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SAMARINDA

Oleh:

DWI RAMA NUGRAHA

Widyaiswara Ahli Pertama, Balai Diklat LHK Samarinda

ABSTRACT

This study aims to analyze the learning styles of training participants namely Technical Staff of Round Wood Examiner Batch IV at the Samarinda Environment and Forestry Training Centre. In addition, this study analyzes the suitability of learning design in terms of methods and tools as well as training support materials with identified learning styles. Data was collected by means of a modality test using a questionnaire which is adapted from De Porter & Hernacki as well as through direct observation. The results showed that the learning styles of participants are visual (16 participants or 47.06%); auditory (4 participants or 11.76%); kinesthetic (3 participants or 8.82%); visual auditory (8 participants or 23.54%); visual kinesthetic (2 participants or 5.88%); and auditory kinesthetic (1 participant or 2.94%). The learning methods is also in accordance with the characteristics of learning styles of the participants. In the future, identification of this learning style should be at the beginning of the selection of participants so that it can be the basis for preparing design and training materials.

Keywords: *instructional design, learning style, technical staff of round wood examiner, training*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas pokok widyaiswara mengalami perubahan. Sebelumnya tugas widyaiswara adalah melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan (dikjartih) PNS, evaluasi, dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014. Namun, tugas widyaiswara menjadi semakin luas yaitu meliputi kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021. Tugas baru ini semakin mewajibkan dan mendorong widyaiswara untuk semakin mengembangkan pemilihan metode, strategi, dan media pembelajaran. Kesesuaian antara karakteristik peserta pelatihan dengan metode, strategi, dan media pembelajaran akan membuat tujuan pembelajaran tercapai (Winarni & Lestari, 2021).

Dalam model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*), tepatnya pada bagian *Analyze*, analisis target peserta pelatihan sebaiknya dilakukan karena desain pembelajaran dan penyampaian materi (metode) kepada peserta didik sangat dipengaruhi oleh karakteristik peserta tersebut (FAO, 2021). Gaya belajar merupakan cara yang dipilih oleh seseorang untuk menggunakan kemampuannya, menyerap dan mengatur pengetahuan, serta menggunakannya untuk memecahkan persoalan (Nasution, 2010). Menurut Musrofi (2016), jika seseorang mengenali gaya belajar, prestasinya akan lebih baik dibandingkan orang lain yang tidak mengetahui atau mengoptimalkan gaya belajarnya. Gaya belajar atau *learning style* merupakan karakteristik peserta yang menentukan bagaimana desain dan metode pembelajaran harus dilakukan (Siwi & Yuhendri, 2016).

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Lindung

dan Hutan Produksi, Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANIS-PH) adalah setiap orang yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan. Salah satu GANIS-PH adalah GANIS-PH Pengujian Kayu Bulat (PKB). GANIS-PH PKB memiliki tugas mengukur, menguji, dan mencatat ke dalam Buku Ukur seluruh hasil kayu penebangan untuk digunakan sebagai dasar pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP).

Saat ini salah satu cara untuk memperoleh kompetensi sebagai GANIS-PH PKB adalah dengan mengikuti Pelatihan GANIS-PH PKB. Oleh karena itu, ketersediaan GANIS-PH menjadi suatu kebutuhan wajib bagi unit pengelolaan hutan. Sehingga pelatihan GANIS-PH PKB merupakan pelatihan yang rutin dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PUSDIKLAT SDM LHK) dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BALAI DIKLAT LHK). Saat ini pelaksanaan pelatihan GANIS-PH PKB dilaksanakan dengan metode *blended learning*. *Blended learning* adalah metode *e-learning* campuran yang mengkombinasikan kegiatan pembelajaran secara *online* dan tatap muka (Hoic-Bosic *et al.*, 2008).

Menurut Nugraha (2021), penerapan *blended learning* pada Pelatihan GANIS-PH PKB Angkatan II 2021 dirasa “cukup” efektif. Namun, durasi waktu fase *online* dan klasikal dirasa perlu dievaluasi kembali agar tujuan pelatihan dapat tercapai dengan optimal. Pelatihan yang menekankan keterampilan cukup sulit mencapai tujuannya jika persentase fase *online* terlalu besar. Lebih lanjut, peserta merasa lebih nyaman belajar pada fase *offline* dibandingkan dengan fase *online*. Menurut mereka, saat fase *offline* mereka lebih mudah memahami materi karena mereka langsung melakukan praktik di lapangan. Hal ini berarti ada ketidaksesuaian antara desain dan metode pembelajaran yang ada dengan kebutuhan atau gaya belajar peserta pelatihan.

Pada bulan Desember 2021, Balai Diklat LHK Samarinda mengadakan Pelatihan GANIS-PH PKB Angkatan IV. Pelatihan ini juga dilaksanakan dengan metode *Blended Learning*. Berdasarkan penelusuran penulis, saat ini belum ada penelitian atau kajian mengenai gaya belajar yang menyasar pada Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan, khususnya Tenaga Teknis Pengukuran dan

Pengujian Kayu Bulat (GANIS PH PKB) dengan metode *blended learning*. Putra (2020) dan Winarni & Lestari (2021) melakukan *profiling* gaya belajar peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (LATSAR CPNS) yang akan digunakan untuk menetapkan metode pembelajaran guna mengoptimalkan hasil pembelajaran. Siwi & Yuhendri (2016) menganalisis gaya belajar mahasiswa suatu perbankan, dimana selain memiliki gaya belajar tunggal (hanya *Visual*, *Auditory*, atau *Kinesthetic*), terdapat kombinasi gaya belajar *Visual Auditory* (VA), *Visual Kinesteci* (VK), dan *Auditory Kinesthetic* (AK). Klement (2014) mengkategorikan 354 mahasiswa Palacky University di Olomouc, Republik Ceko menjadi 4 (empat) jenis gaya belajar, yaitu *Visual*, *Aural/Auditory*, *Read/Write*, dan *Kinesthetic* (VARK). Sehingga, kajian mengenai kesesuaian gaya belajar peserta Pelatihan GANIS-PH PKB dengan model pembelajaran/pelatihan menjadi menarik untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik gaya belajar peserta Pelatihan GANIS-PH PKB Angkatan IV di Balai Diklat LHK Samarinda?
2. Bagaimana kesesuaian metode pembelajaran Pelatihan GANIS-PH PKB Angkatan IV dengan karakteristik gaya belajar peserta?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui karakteristik gaya belajar peserta Pelatihan GANIS PH PKB Angkatan IV di Balai Diklat LHK Samarinda.
2. Mengetahui kesesuaian metode pembelajaran Pelatihan GANIS-PH PKB Angkatan IV dengan karakteristik gaya belajar peserta.

II. METODOLOGI

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif – kualitatif (*mixed methods*). Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner yang terdiri dari 30 pertanyaan yang

mengadopsi teori gaya belajar De Porter & Hernacki (1999) yang dikenal dengan Tes Modalitas. Tes Modalitas dapat diartikan sebagai tes yang menentukan jenis kepribadian dan gaya belajar yang menggambarkan ciri-ciri dari jenis kepribadian yang bersumber dari pakar. Setiap pertanyaannya berisi 3 (tiga) item yang menggambarkan pilihan untuk *visual*, *auditory*, dan *kinesthetic* yang dirumuskan dalam tingkah laku hidup keseharian yang berhubungan dengan pembelajaran.

Menurut Sari (2014), peserta didik atau seorang pembelajar *visual* bisa belajar dengan sangat baik hanya dengan cara melihat orang lain melakukannya. Mereka menyukai cara penyajian informasi yang runtut. Selama pembelajaran tersebut, mereka suka menulis apa yang dikatakan pendidik/guru/dosen/trainer. Sementara itu, tipe *Auditory* mengandalkan kemampuan untuk mendengar. Selanjutnya, tipe *Kinestetik* lebih suka belajar dengan cara terlibat langsung.

Kuisisioner Tes Modalitas dibagikan dalam bentuk *Google Forms* kepada 34 (tiga puluh empat) responden penelitian yang merupakan peserta Pelatihan GANIS-PH PKB Angkatan IV. Hasil tes modalitas dapat dianalisis dari jawaban setiap individu dengan jawaban A terbanyak memiliki arti V (*Visual*), sedangkan B memiliki arti A (*Audio*), serta C memiliki arti K (*Kinesthetic*). Penentuan gaya belajar peserta dilakukan dengan melihat dominasi jawaban kuisisioner mereka apakah tipe *Visual*, *Auditory*, atau *Kinesthetic*.

Jika ada peserta yang memiliki jawaban yang merepresentasikan 2 (dua) gaya belajar maka akan dikategorikan memiliki kombinasi gaya belajar *Visual Auditory* (VA), *Visual Kinesthetic* (VK), dan *Auditory Kinesthetic* (AK).

Pengumpulan data kesesuaian metode pembelajaran dilakukan dengan mempersentasikan penggunaan metode pembelajaran terhadap total jam pelajaran pelatihan. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan persentase gaya belajar peserta pelatihan. Data yang dikumpulkan nantinya akan dipergunakan untuk melihat kesesuaian metode pembelajaran dengan karakteristik gaya belajar peserta pelatihan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Gaya Belajar

Identifikasi gaya belajar peserta pelatihan selain berguna untuk menyiapkan desain dan metode pembelajaran yang tepat juga dapat digunakan untuk menilai apakah proses pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan karakteristik peserta. Hasil tabulasi gaya belajar peserta Pelatihan GANIS-PH PKB Angkatan IV di Balai Diklat LHK Samarinda dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Gaya Belajar

Satuan	Gaya Belajar						Jumlah
	V	A	K	VA	VK	AK	
Responden	16	4	3	8	2	1	34

Sumber: data primer 2021 (diolah)

Keterangan: V : *Visual*; A : *Auditory*; K : *Kinesthetic*; VA : *Visual Auditory*; VK : *Visual Kinesthetic*; AK : *Auditory Kinesthetic*

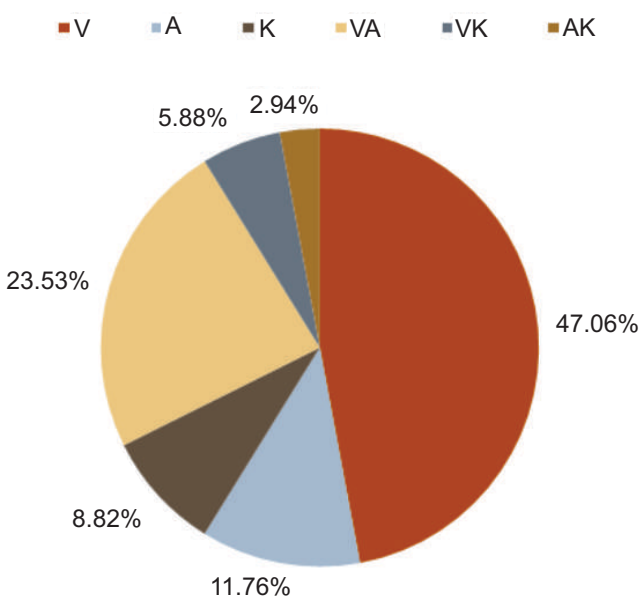
Seperti yang digambarkan pada Tabel 1, gaya belajar V (*Visual*) merupakan gaya belajar yang dominan di Pelatihan GANIS-PH PKB Angkatan IV. Ada 16 (enam belas) orang peserta atau 47,06% dari jumlah peserta memiliki karakteristik gaya belajar *Visual*, diikuti dengan gaya belajar campuran/ kombinasi VA (*Visual Auditory*) sebanyak 8 (delapan) orang atau 23,53% dari jumlah peserta (Gambar 1). Sementara itu, gaya belajar campuran/kombinasi AK (*Auditory Kinesthetic*) adalah gaya belajar yang paling tidak dominan yaitu dengan jumlah 1 (satu) orang peserta atau hanya 2,94% dari jumlah peserta pelatihan (Gambar 1).

Pada umumnya, seseorang memiliki kecenderungan untuk memiliki salah satu gaya belajar tersebut atau perpaduannya. Beberapa orang belajar dengan melihat (*Visual*), beberapa orang belajar dengan mendengar (*Auditory*), beberapa orang belajar dengan melakukan (*Kinesthetic*), dan beberapa orang belajar dengan mengombinasikan dua atau ketiganya (Sree & Tay, 2017).

Tingginya gaya belajar V dan VA menunjukkan bahwa peserta Pelatihan GANIS-PH KB sebagian besar cenderung memiliki kebiasaan belajar dan menyerap informasi dengan cara mengamati dan memperhatikan kondisi atau

lingkungan sekitar. Menurut Zahroh & Asyhar (2014), gaya belajar *visual* mencerminkan kebiasaan belajar atau pola kecenderungan mereka dalam menyerap informasi melalui kegiatan observasi. Gaya belajar *visual* mudah menyerap dan memahami informasi yang disampaikan secara *visual*, seperti grafik, gambar, video, atau bacaan yang membutuhkan kemampuan nalar dan berpikir (Murfi dan Rosidah, 2016). Selain gaya belajar V (*visual*), gaya belajar A (*auditory*) juga perlu diperhatikan karena ada karakteristik *auditory* di gaya belajar campuran VA. Menurut Subini (2011), gaya belajar A menyukai pembelajaran dengan metode ceramah, berdialog, dan berdiskusi serta senang mendengar materi yang dibacakan nyaring. Persentase gaya belajar peserta pelatihan dapat dilihat pada Gambar 1.

Pemahaman gaya belajar peserta pelatihan akan membantu widyaiswara untuk merencanakan desain dan metode pembelajaran yang sesuai. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Winarni & Lestari (2021) yaitu pengumpulan profil gaya belajar peserta diklat dapat digunakan sebagai penyesuaian strategi, pendekatan, metode dan media pembelajaran dalam merancang pembelajaran diklat.



Gambar 1. Persentase gaya belajar peserta pelatihan

Keterangan: V : *Visual*; A : *Auditory*; K : *Kinesthetic*; VA : *Visual Auditory*; VK : *Visual Kinesthetic*; AK : *Auditory Kinesthetic*

B. Kesesuaian Metode Penyampaian Pembelajaran dengan Gaya Belajar

Pelatihan GANIS-PH PKB Angkatan IV yang dilaksanakan oleh Balai Diklat LHK Samarinda dilaksanakan dengan skema *blended learning*. Pembelajaran teori dilakukan secara *online* (*synchronous & asynchronous*), sedangkan pembelajaran praktik dilakukan secara *offline* dengan praktik langsung di lapangan. Dalam pelatihan, widyaiswara diwajibkan untuk membuat desain pembelajaran sebagai panduan dalam mengajar. Desain pembelajaran ini mengacu pada kurikulum dan silabus. Dalam desain pembelajaran terdapat metode penyampaian materi/pembelajaran. Hal ini seharusnya sesuai dengan karakteristik gaya belajar peserta sehingga peserta nyaman dan mudah menyerap informasi/materi saat pelatihan. Berdasarkan observasi selama pelatihan, persentase penggunaan metode penyampaian pembelajaran pada Pelatihan GANIS-PH PKB dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Persentase Metode Penyampaian Pembelajaran Pelatihan GANIS-PH PKB

Metode	Persentase (%)
Ceramah	30,83
Diskusi	10,53
Studi Kasus	4,51
Demonstrasi	54,14
Jumlah	100

Seperti digambarkan pada Tabel 2, metode penyampaian pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran Pelatihan GANIS-PH PKB Angkatan IV terdiri dari ceramah, diskusi, studi kasus, dan demonstrasi. Demonstrasi merupakan metode yang paling banyak digunakan yaitu 54,14% dari total jam pelajaran Pelatihan GANIS-PH PKB. Hal ini relevan karena pada kurikulum Pelatihan GANIS-PH PKB alokasi untuk keterampilan (praktik) sebanyak 72 JP dari total 134 JP. Pada metode demonstrasi, peserta mempraktikkan langsung teori-teori yang di dapatkan seperti mengidentifikasi jenis kayu; melakukan pengukuran kayu bulat; menentukan volume kayu bulat besar, sedang, kecil; menguji

kayu, dan melakukan penatausahaan hasil hutan. Saat praktik tersebut peserta melihat langsung penampang kayu, bentuk log kayu, cacat pada log kayu, tampilan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), mengisi dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan di metode demonstrasi ini telah mengakomodir gaya belajar dominan pada Pelatihan GANIS-PH PKB yaitu gaya belajar *visual*. Menurut De Porter *et al.* (2014), gaya belajar *visual* memiliki ciri belajar sistematis, teratur, mudah mengingat gambaran. Sehingga, pengajar wajib mengarahkan pembelajaran yang mendorong peserta untuk mendeskripsikan informasi dari gambar, tabel, kata kunci, *flow chart*, dan sebagainya.

Karakteristik gaya belajar *visual* juga terakomodir di metode ceramah yang diterapkan sebanyak 30,68% dari total jam pelajaran. Pada metode ceramah tersebut tersedia materi berupa video dan bahan tayang yang berkenaan dengan materi yang disampaikan *Synchronous* saat *zoom meeting* (Gambar 2). Pada metode studi kasus yang digunakan sebanyak 4,51% dari total jam pelajaran, peserta diberi soal/kasus yang dilengkapi dengan gambar-gambar (pori-pori kayu, warna kayu, bentuk log kayu, *flow chart* penatausahaan hasil hutan, dan lain-lain).

Selain gaya belajar *visual*, metode penyampaian pembelajaran yang diterapkan pada pelatihan juga mengakomodir gaya belajar *auditory* dan *kinesthetic*. Penggunaan metode ceramah, studi kasus dan diskusi sangat cocok untuk gaya belajar *auditory*. Video tutorial yang tersedia di LMS juga dilengkapi suara (*voice*) untuk semakin mempermudah pemahaman peserta. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri gaya belajar *auditory* yaitu senang mendengarkan arahan yang berulang-



Gambar2. Penyampaian materi dengan ceramah saat *synchronous*

ulang, dan senang berbicara. Dengan demikian, pembelajaran harus diarahkan menggunakan tanya jawab, *role play*, kerja kelompok, dan sebagainya (De Porter *et al.*, 2014).

Pelatihan GANIS-PH PKB adalah pelatihan yang juga menuntut keterampilan, sehingga metode yang mencerminkan gaya belajar *kinesthetic* juga wajib dilakukan. Metode demonstrasi mengakomodir gaya belajar *kinesthetic* karena peserta melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pengujian kayu bulat secara langsung di lapangan sekaligus mempraktikkan penggunaan alat-alat ukur kayu.

Pada pelaksanaan praktik selain peserta melakukan demonstrasi, pengajar juga memberikan arahan berupa ceramah dan memberi kesempatan untuk kerja kelompok serta diskusi yang sangat mendukung gaya belajar *kinesthetic*.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gaya belajar peserta Pelatihan GANIS-PH PKB Angkatan IV terdiri dari gaya belajar V (*Visual*) sebanyak 16 orang (47,06%); A (*Auditory*) sebanyak 4 orang (11,76%); K (*Kinesthetic*) sebanyak 3 orang (8,82%); VA (*Visual Auditory*) sebanyak 8 orang (23,54%); VK (*Visual Kinesthetic*) sebanyak 2 orang (5,88%); dan AK (*Auditory Kinesthetic*) sebanyak 1 orang (2,94%).
2. Metode pembelajaran Pelatihan GANIS-PH PKB sudah sesuai dengan karakteristik gaya belajar peserta pelatihan karena metode penyampaian pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, studi kasus, dan demonstrasi telah mengakomodir seluruh gaya belajar peserta.

B. Rekomendasi

Identifikasi gaya belajar untuk peserta pelatihan sebaiknya dilakukan sebelum membuat desain dan menerapkan metode pembelajaran dan bahan-bahan pembelajaran sehingga proses pembelajaran dalam pelatihan akan semakin sesuai dengan karakteristik peserta. Pada masa mendatang, identifikasi ini dapat dilakukan saat pendaftaran atau penjurangan peserta pelatihan melalui pengisian kuisioner identifikasi gaya belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- De Porter, B. D., & Hernacki, M. 1999. Quantum Learning. New York: Kaifa.
- De Porter, B., Mark, R., & Sarah, S. N. 2014. Quantum Teaching: Orchestrating Student Success. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- FAO. 2021. E-learning Methodologies and Good Practices. Food and Agriculture Organization. <https://www.fao.org/3/i2516e/i2516e.pdf>. Diunduh 25 Maret 2022.
- Hoic-Bozic, V. Mornar, & I. Boticki. 2009. A Blended Learning Approach to Course Design and Implementation. IEEE Transactions on Education, vol. 52, no. 1, pp. 19-30. Diunduh 27 Juni 2022.
- Klement, M. 2014. How do my students study? An analysis of student of educational disciplines favorite learning styles according to VARK classification. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 132, 384-390. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814032364>. Diunduh 03 Mei 2022.
- Musrofi, M. 2016. Sukses Akademik dan Sukses Bakat. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nasution, S. 2010. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugraha, D. R. 2021. Evaluasi Metode Blended Learning: Studi Kasus Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari Pengujian Kayu Bulat Angkatan II di BDLHK Samarinda. Silvika. Vol 104 (12) 3-12.
- Murfi, A. & Rosidah, N.S. 2016. Analisis Gaya Belajar Siswa Berprestasi Studi Komparasi Siswa Berprestasi SMAN 1 dengan MAN 1 Yogyakarta Kelas XI. Jurnal Pendidikan Madrasah, 1(2), pp. 295-308. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPM/article/view/1220>. Diunduh 03 Mei 2022.
- Putra, A. 2020. Profilling Gaya Belajar Peserta Pelatihan Dasar CPNS melalui Tes VAK. Journal of Teaching dan Learning Research, 2(1), 23-30. Diunduh 03 Mei 2022.
- Sari, A. K. 2014. Analisis karakteristik gaya belajar VAK (visual, auditorial, kinestetik) mahasiswa pendidikan informatika angkatan 2014. Jurnal Ilmiah Edutic: Pendidikan dan Informatika, 1(1).
- Siwi, M. K., & Yuhendri, L. V. 2016. Analysis characteristics of learning styles VAK (Visual, Auditory, Kinesthetic) student of banks and financial institutions course. In International Conference on Education for Economics, Business, and Finance (ICEEBF) (pp. 437-446).
- Sree, N. S., & Chinyi, H. T. 2017. Styles of Learning VAK. International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field, 3 (4). <https://www.ijirmf.com/wp-content/uploads/2017/04/201704003.pdf>. Diunduh 09 Mei 2022.
- Subini, N. 2011. Rahasia gaya belajar orang besar. Yogyakarta: Javalitera.
- Winarni, W., & Lestari, Y. 2021. Profil Gaya Belajar Dominan Pada Peserta Latsar CPNS. Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan), 3(3), 1-4. <https://doi.org/10.52005/belaindika.v3i3.84>. Diunduh 01 Mei 2022.
- Zahroh, U., & Asyhar, B. 2014. Kecenderungan Gaya Belajar Mahasiswa dalam Menyelesaikan Masalah Fungsi Bijektif. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, 2(1). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1738>. Diunduh 09 Mei 2022.



*“Lebih baik mendengarkan kebenaran
meski itu amat menyakitkan,
dibandingkan mendengarkan kebohongan
meski itu menyenangkan*



PENGEMBANGAN KURIKULUM PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PEMBINAAN HUTAN

Oleh:

ELOK BUDININGSIH

Widyaiswara Ahli Muda, Pusat Diklat SDM LHK

ABSTRACT

Centre for Environment and Forestry Education and Training develops curriculum based on new regulations and policies, the development of new science and technology as well as the applicability of the curriculum. One of the curricula that has been reviewed is the curriculum of Forest Guiding Technical Staff of Sustainable Production Forest Management. A study is needed to provide an overview of the development of the curriculum by looking at four curriculum components, namely objectives, materials, strategies and evaluation. The research was conducted in June 2022. The method used was interviews to resource person and a literature review of the training curriculum for Technical Staff of Forestry Guidance on Sustainable Production Forest Management. This study concludes that there are several changes in the four components of the training curriculum for Technical Staff of Forestry Guidance on Sustainable Production Forest Management, namely the curriculum format, the materials taught which is the later curriculum is based on the Indonesian Workforce Competency Standard, learning methodology, and evaluation method for students.

Keyword: *competencies, curriculum, Technical Staff of Forestry Guidance on Sustainable Production Forest Management*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan kapasitas dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga teknis terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan. Pengertian pelatihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah “kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”. Kamil (2010) menyebutkan bahwa pelatihan adalah proses yang direncanakan, bukan kegiatan yang bersifat kebetulan. Komponen yang harus dipenuhi dalam pelatihan agar pembelajarannya berjalan efektif diantaranya tersedia kurikulum. Kurikulum memegang peranan penting dalam keberhasilan pelatihan. Dengan berjalannya waktu ada banyak tantangan dan perubahan peraturan, sehingga kurikulum pelatihan juga memerlukan penyesuaian dan pengembangan.

Pengertian kurikulum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan”. Desain kurikulum pelatihan menjadi sebuah rancangan yang telah direncanakan yang terdiri dari tujuan, materi dan cara yang digunakan sesuai dengan kebutuhan Lembaga, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan tertentu (Bahrissalim dan Fauzan, 2018). Zuhdi (2011) dalam Bahrissalim dan Fauzan (2018) mengemukakan empat komponen kurikulum, yaitu tujuan, pengalaman (materi), organisasi dan evaluasi. Sedangkan Zais (1976) dalam Bahrissalim dan Fauzan (2018) menyatakan bahwa kurikulum mencakup: tujuan, isi materi, kegiatan belajar, dan evaluasi.

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga pelatihan akan selalu mengembangkan kurikulum pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Kepala BP2SDM Nomor 11/P2SDM/SET/ DIK.2/9/2017, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan pengembangan kurikulum melalui proses perbaikan dan/atau penyempurnaan kurikulum diantaranya berdasarkan: peraturan dan kebijakan baru, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, serta kesalahan-kesalahan yang dianggap penting. Pengembangan kurikulum penting untuk meningkatkan keberhasilan sistem pelatihan secara menyeluruh. Kurikulum pelatihan harus terus berkembang agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan kompetensi kerja pegawai, perkembangan teknologi dan informasi, serta perkembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundangan (Firdaus, 2016).

Salah satu kurikulum yang mengalami perubahan dan pengembangan adalah Kurikulum Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANIS-PHPL BINHUT). Perubahan kurikulum tersebut didasari adanya perubahan peraturan tentang kompetensi GANISPHPL BINHUT. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 dirubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014, yang kemudian dirubah lagi menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi.

Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut GANIS-PHPL menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 adalah setiap orang yang memiliki sertifikat kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.

Salah satu kompetensi GANIS-PHPL di bidang pemanfaatan hasil hutan adalah GANIS-PHPL Pembinaan Hutan. PermenLHK Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 menyatakan perlunya sertifikasi profesi GANIS-HPL dilaksanakan melalui uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi GANISPHPL yang telah ditetapkan. Calon peserta sertifikasi uji kompetensi profesi harus memenuhi persyaratan diantaranya telah lulus diklat berbasis kompetensi GANIS-PHPL. Oleh karena ini diperlukan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi.

B. Rumusan Masalah

Kurikulum Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANIS-PHPL BINHUT) mengalami perkembangan beberapa kali. Oleh karena itu diperlukan kajian untuk memberikan gambaran tentang perkembangan kurikulum pelatihan GANIS-PHPL BINHUT. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah: Bagaimana perubahan kurikulum tersebut dilihat dari komponen kurikulum yang terdiri dari: tujuan, materi, strategi, dan evaluasi?

C. Tujuan kajian

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan 4 komponen yaitu: tujuan, isi/materi, strategi dan evaluasi dalam kurikulum Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANIS-PHPL BINHUT) yang mengalami perubahan karena adanya perubahan peraturan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk pembuatan kurikulum GANIS-PHPL BINHUT berikutnya.

II. METODOLOGI

A. Waktu dan Lokasi

Kajian dilakukan pada bulan Juni 2022 di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Metode

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diambil dengan wawancara narasumber terkait kurikulum pelatihan GANIS-PHPL BINHUT. Data sekunder dilakukan dengan cara menelaah kurikulum dan silabus Kurikulum Pelatihan GANIS-PHPL BINHUT. Data dianalisis dengan metode deskriptif. Menurut Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, serta keterkaitan antar kegiatan.

Telaahan kurikulum GANIS-PHPL BINHUT dilakukan terhadap tujuan, isi/materi, strategi

dan evaluasi dari program pelatihan. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penulisan hasil kajian yang menguraikan gagasan tentang pengembangan kurikulum dengan melihat 4 komponen di atas. Dengan kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 4 komponen kurikulum yang tepat dalam pelatihan GANIS-PHPL BINHUT. Penelitian menggambarkan fenomena pengembangan kurikulum dengan menggunakan teori bahwa komponen kurikulum terdiri dari tujuan, materi, strategi dan evaluasi (H.H Giles *et al.* dalam LAN, 2007). Isi dari 4 (empat) komponen kurikulum tersebut dipengaruhi oleh perubahan peraturan tentang GANIS-PHPL BINHUT. Hal ini yang akan membuat kurikulum akan terus berkembang dan mengalami perubahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komponen Tujuan

Komponen “tujuan” karena akan menjadi acuan bagi komponen kurikulum lainnya, maka rumusannya berisi pernyataan terkait kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta pelatihan. Kemampuan atau kompetensi GANIS-PHPL BINHUT harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan prinsip kurikulum pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satunya adalah bahwa kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan perkembangan peraturan dan kebijakan serta pelaksanaan tugas.

Kurikulum Pelatihan GANIS-PHPL BINHUT mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundangan. Perubahan-perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kurikulum Pelatihan Tahun 2009

GANIS-PHPL dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 terdiri atas GANISPHPL Pembinaan Hutan, GANIS-PHPL Kelola Lingkungan, dan GANIS-PHPL Kelola Sosial. Jadi pelaksanaan tugas setiap GANIS-PHPL dipisah sesuai nama GANIS-PHPL yang ada. Oleh karena itu, disusun 3 kurikulum sesuai dengan nama GANIS-PHPL tersebut.

Kurikulum GANIS-PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT) dengan SK 27/DIK-2/2009

tanggal 30 April 2009 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008. Peraturan tersebut menyatakan bahwa GANIS-PHPL BINHUT memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan hutan sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan meliputi pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan (penyiangan, penjarangan, pembebasan) dan monitoring petak ukur permanen (PUP) pada hutan alam atau hutan tanaman.
- b. Melakukan sistem dan teknik silvikultur dalam pengelolaan hutan produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan persiapan lahan dalam rangka rehabilitasi lahan, membuat pembibitan, melakukan penanaman dan pengayaan, penjarangan dan pembebasan tegakan.

Berdasarkan kompetensi di atas, Tujuan pembelajaran umum (TPU) GANIS-PHPL BINHUT adalah untuk mencukupi kebutuhan jumlah GANIS-PHPL BINHUT yang diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembinaan hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing perusahaan. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) yang disusun sesuai SK 27/DIK-2/2009 adalah sebagai berikut:

- 1). Dapat membuat perencanaan pembinaan hutan sesuai dengan peraturan-peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku.
- 2). Dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam membuat pembinaan hutan produksi.
- 3). Mengetahui dan menguasai aspek-aspek teknis dalam rangka pelaksanaan pembinaan hutan produksi.

Kurikulum Pelatihan GANISPHPL Kelola Sosial dengan SK 33/DIK-2/2009 tanggal 30 April 2009 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 GANISPHPL Kelola Sosial memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), mengelola konflik sosial, adat, sektoral dan masyarakat sekitar.

- b. Menginventarisir konflik lahan antara pemegang izin dengan masyarakat setempat.
- c. Menyusun rencana dan memfasilitasi kelola sosial terkait dengan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (PHBM), Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dan Bina Desa Hutan (BDH).
- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kelola sosial.

Berdasarkan kompetensi di atas, Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Pelatihan GANIS-PHPL Kelola Sosial adalah untuk mencukupi jumlah GANISPHPL Kelola Sosial yang diharapkan mampu melaksanakan kegiatan kelola sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing perusahaan. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) yang disusun sesuai SK 33/DIK-2/2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat membuat perencanaan kelola sosial sesuai dengan peraturan-peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku.
- 2) Dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam pelaksanaan kelola sosial.
- 3) Mengetahui dan menguasai aspek-aspek teknis dalam rangka pelaksanaan kelola sosial dalam pemanfaatan hutan produksi.

Kurikulum Pelatihan GANISPHPL Kelola Sosial dengan SK 34/DIK-2/2009 tanggal 30 April 2009 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 GANIS-PHPL Kelola Lingkungan memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan lindung, DAS, pengendalian perambahan, kebakaran, pembalakan illegal, perlindungan flora dan fauna langka dilindungi dan terancam punah serta pelaksanaan Analisa mengenai Dampak Lingkungan/Sertifikasi Dampak Lingkungan (AMDAL/SEMDAL), Rencana Kelola Lingkungan/ Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL).
- b. Memahami dan menguasai peraturan tentang AMDAL.
- c. Menyusun dan melaksanakan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai AMDAL.

- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kelola lingkungan.

Berdasarkan kompetensi di atas, Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) pelatihan GANIS-PHPL Kelola Lingkungan adalah untuk mencukupi jumlah GANISPHPL Kelola Lingkungan yang diharapkan mampu melaksanakan tugas kelola lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing perusahaan. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) yang disusun (sesuai SK33/DIK-2/2009) adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat membuat rencana kelola lingkungan dalam pengelolaan hutan produksi sesuai dengan peraturan-peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku.
- 2) Mengetahui dan menguasai aspek-aspek administrasi dan teknis dalam rangka pelaksanaan kelola lingkungan.
- 3) Melaksanakan kelola lingkungan dalam pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku.

2. Kurikulum Pelatihan Tahun 2015

Kurikulum Diklat GANIS-PHPL BINHUT dengan SK. 235/Diklat-2/2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014. Sesuai dengan Peraturan tersebut kompetensi yang dibangun adalah:

- a. Memahami dan menguasai sistem dan teknik silvikultur.
- b. Melakukan persiapan lahan dalam rangka rehabilitasi lahan, membuat pembibitan, melakukan penanaman dan pengayaan, penjarangan dan pembebasan tegakan.
- c. Memahami dan menguasai peraturan tentang AMDAL.
- d. Menyusun dan melaksanakan Upaya Kelola Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Rencana Kelola Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai AMDAL. Lingkungan (RPL) sesuai AMDAL.
- e. Menginventarisir konflik lahan antara pemegang izin dengan masyarakat setempat.
- f. Menyusun rencana dan memfasilitasi kelola sosial terkait dengan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK), Bina Desa Hutan.

- g. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan kompetensi di atas, tujuan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan tugas sebagai GANIS-PHPL BINHUT pada hutan produksi. Sedangkan sasaran pelatihan sesuai SK. 235/Diklat-2/2015 adalah mampu:

- 1) Menjelaskan dan menguasai sistem dan teknik silvikultur.
- 2) Melakukan persiapan lahan dalam rangka rehabilitasi lahan.
- 3) Membuat pembibitan.
- 4) Melakukan penanaman dan pengayaan.
- 5) Melakukan penjarangan dan pembebasan tegakan.
- 6) Melakukan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan.
- 7) Melakukan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sosial.
- 8) Membuat laporan yang menguraikan secara jelas pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pembinaan hutan.

Peraturan di atas memuat Kompetensi GANISPHPL BINHUT yang terdiri dari kegiatan pembinaan hutan, kegiatan kelola lingkungan dan kegiatan kelola sosial. Dengan demikian, ada perubahan yaitu yang semula 3 (tiga) kurikulum menjadi 1 (satu) kurikulum.

3. Kurikulum Pelatihan tahun 2021

Pelatihan GANIS-PHPL BINHUT sesuai SK. 55 /Dik/PEPE/Dik-2/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu Pada Jabatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Peraturan tersebut menyatakan bahwa GANIS-PHPL BINHUT memiliki kompetensi dengan fungsi kunci mengendalikan pembinaan hutan yang tersusun dari 3 fungsi utama yaitu:

1. Pengendalian kegiatan persemaian, penanaman dan pemeliharaan dengan fungsi dasar:

- a. Merencanakan Pembinaan Hutan.
- b. Mengawasi Kegiatan pembinaan Hutan.

2. Melaksanakan Kelola Lingkungan dengan fungsi dasar:

- a. Mengawasi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
- b. Melaksanakan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan.

3. Melaksanakan Kelola Sosial dengan fungsi dasar:

- a. Melakukan pemetaan potensi konflik sosial.
- b. Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan.
- c. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan kompetensi di atas, tujuan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melaksanakan tugas sebagai GANIS-PHPL BINHUT. Sasaran pelatihan sesuai SK. 235/Diklat-2/2015 adalah mampu:

1. Menjelaskan Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
2. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
3. Mengorganisasikan Pekerjaan.
4. Menjelaskan teknik komunikasi yang efektif.
5. Merencanakan kegiatan Pembinaan Hutan.
6. Mengawasi kegiatan Pembinaan Hutan.
7. Mengawasi kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
8. Melaksanakan Pemantauan Dampak terhadap Tanah dan Air akibat Pemanfaatan Hutan.
9. Melaksanakan pemetaan potensi konflik sosial.
10. Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan.
11. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Format kurikulum tahun 2009 untuk penyebutan komponen tujuan masih menggunakan Tujuan Pembelajaran Umum (TPU), Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) serta sasaran diklat, sementara kurikulum tahun 2015 dan 2021 dengan Tujuan Diklat/Pelatihan dan Sasaran Diklat/Pelatihan. TPU adalah tujuan instruksional umum dan kata-katanya masih umum serta belum

dapat diukur. TPK adalah rumusan tujuan yang ditujukan pada peserta serta langsung dapat diketahui (diukur) pada setiap kegiatan pengajaran berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wiyanto (Widyaiswara Pusdiklat SDM KLHK), Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) pada tahun 2015 mengarahkan perubahan nomenklatur “tujuan kurikulum” dari TPU dan TPK menjadi Tujuan Diklat/Pelatihan. Tujuan diklat/pelatihan berisi penjelasan tentang kompetensi umum yang akan dicapai peserta setelah mengikuti pelatihan. Sasaran pelatihan menjelaskan tentang kompetensi khusus yang ingin dicapai peserta setelah mengikuti pelatihan (Peraturan Kepala BP2SDM Nomor P.11/P2SDM/SET/DIK.2/9/2017).

Komponen tujuan dan sasaran disusun berdasarkan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan. Hal ini sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor: 13 TAHUN 2011 bahwa Kurikulum Diklat Teknis mengacu pada standar kompetensi teknis yang dibutuhkan dan disiapkan oleh instansi yang bersangkutan. SKKNI dijadikan rujukan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum program pendidikan dan pelatihan.

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Komponen Materi/Isi/Bahan

Bahan kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta pelatihan dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Kurniasih dan Sani (2014), secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Gambaran beberapa materi yang tertuang dalam GANIS-PHPL BINHUT dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 di bawah ini:

1. Kurikulum tahun 2009

Tabel 1. Kurikulum Diklat GANIS-PHPL BINHUT

No.	Mata Pelajaran	JPL
A.	Teori	58
1	Bina Suasana Pelatihan	4
2	Kecerdasan Spiritual dan Emosional (ESQ)	4
3	Kebijakan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kebijakan	4
4	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	4
5	Teknik dan Sistem Silviculture	6
6	Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT)	6
7	Persemaian/Pembibitan	8
8	Penanaman, Pengayaan dan Rehabilitasi Hutan	8
9	Pemeliharaan Hutan	8
10	Perlindungan Hutan	6
B.	Praktik	62
1	Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT)	10
2	Persemaian/Pembibitan	16
3	Penanaman, Pengayaan dan Rehabilitasi Hutan	16
4	Pemeliharaan Hutan	10
5	Perlindungan Hutan	10
	Jumlah	120

2. Kurikulum tahun 2015

Tabel 2. Kurikulum Diklat GANIS-PHPL BINHUT

No.	Mata Diklat	JPL
A.	Teori	80
1	Bina Suasana Pelatihan	2
2	Kecerdasan Spiritual dan Emosional (ESQ)	2
3	Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	4
4	Kebijakan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	4
5	Sistem dan Teknik Silviculture	4
6	Persiapan Lahan Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan	4
7	Persemaian/Pembibitan	6
8	Penanaman dan Pengayaan	4
9	Penjarangan dan Pembebasan Tegakan	4
10	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan	20
11	Kegiatan Pengelolaan Sosial	20
12	Pembuatan Laporan	6
B.	Praktik	120
1	Persiapan Lahan Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan	10
2	Persemaian/Pembibitan	10
3	Penanaman dan Pengayaan	10
4	Penjarangan dan Pembebasan Tegakan	10
5	Pengelolaan Lingkungan	30
6	Pengelolaan Sosial	30
7	Pembuatan Laporan	20
	JUMLAH	200

3. Kurikulum tahun 2021

Tabel 3. Mata Pelatihan GANIS-PHPL BINHUT Berbasis Kompetensi

No.	Unit Kompetensi	Kode Unit	Perkiraan Waktu Pelatihan (JP)		
			Penge-tahuan	Ketram-pilan	Jumlah
A	Kelompok Unit Kompetensi				
1.	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	A.02GNS01.001.1	90 (2 JP)	90 (2JP)	180 (4 JP)
2.	Mengorganisasikan Pekerjaan	A.02GNS01.002.1	90 (2 JP)	90 (2 JP)	180 (4 JP)
3.	Melakukan Komunikasi Efektif	A.02GNS01.003.1	90 (2 JP)	90 (2 JP)	180 (4 JP)
4.	Merencanakan kegiatan Pembinaan Hutan	A.02GNS01.046.1	225 (5 JP)	450 (10 JP)	675 (15 JP)
5.	Mengawasi kegiatan Pembinaan Hutan	A.02GNS01.047.1	360 (8 JP)	900 (20 JP)	1.260 (28 JP)
6.	Mengawasi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	A.02GNS01.049.2	360 (8 JP)	900 (20 JP)	1.260 (28 JP)
7.	Melaksanakan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	A.02GNS01.050.2	360 (8 JP)	900 (20 JP)	1.260 (28 JP)
8.	Melaksanakan Pemetaan Potensi Konflik Sosial	A.02GNS01.052.1	450 (10 JP)	900 (20 JP)	1.350 (30 JP)
9.	Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan	A.02GNS01.054.1	225 (5 JP)	450 (10 JP)	675 (15 JP)
10.	Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	A.02GNS01.055.1	225 (5 JP)	450 (10 JP)	675 (15 JP)
Jumlah 1			2.475 (55 JP)	5.220 (116 JP)	7.695 (171 JP)
B.	On the Job Training (OJT)	-	-	-	-
C.	Kelompok Non Unit Kompetensi				
1.	Penjelasan Program dan Alur Pelatihan	-	90 (2 JP)	-	90 (2 JP)
2.	Bina Suasana Pelatihan	-	90 (2 JP)	-	90 (2 JP)
3.	Kecerdasan Spiritual dan Emosional (ESQ)	-	90 (2 JP)	-	90 (2 JP)
4.	Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikasi Tenaga Teknis PHPL	-	270 (6 JP)	-	270 (6 JP)
Jumlah 3			540 (12 JP)	-	540 (12 JP)
Jumlah (1+3)			3.015 (67 JP)	5.220 (116 JP)	8.235 (183 JP)

Setiap kurikulum mempunyai mata pelajaran/ diklat/pelatihan yang disesuaikan dengan sasaran pelatihan. Hal ini sesuai Peraturan Kepala BP2SDM Nomor: P.11/P2SDM/SET/DIK.2/9/2017 bahwa perumusan nama mata pelajaran/pelatihan ditentukan dengan memperhatikan sasaran pelatihan. Hal ini karena

pada dasarnya objek dari sasaran pelatihan adalah nama mata pelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka Isi/Materi yang terdapat dalam tiga (3) kurikulum tersebut sangat berbeda. Pada kurikulum 2009 hanya berisi terkait kompetensi pembinaan hutan, sedangkan kurikulum 2015 dan 2021 berisi kompetensi pembinaan hutan, kompetensi pengelolaan lingkungan dan kompetensi pengelolaan sosial.

Format kurikulum juga berbeda disesuaikan dengan bentuk pelatihannya. Kurikulum 2009 dan 2015 menggunakan format kurikulum umum sedangkan kurikulum 2021 menggunakan format kurikulum berbasis standar kompetensi.

Jabar (2011) menyebutkan bahwa silabus adalah penjabaran lebih lanjut dari kompetensi yang ingin dicapai, yang tercermin dari materi pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari peserta dalam rangka pencapaian kompetensi. Silabus harus menggambarkan materi/bahan setiap mata pelatihan, serta indikator hasil belajar dan pokok bahasannya. Indikator hasil belajar mengandung kompetensi khusus yang akan dicapai peserta setelah mengikuti suatu mata pelajaran. Kompetensi khusus tersebut merupakan uraian atau jabaran dari sasaran pelatihan. Berdasarkan Peraturan Kepala BP2SDM Nomor: P.11/P2SDM/SET/DIK.2/9/2017, perumusan materi pokok bahasan dengan merinci dari mata pelajaran dan materi pokok merupakan topik-topik esensial dari suatu mata pelatihan. Materi pokok bahasan harus konsisten dengan setiap indikator keberhasilan.

C. Komponen Strategi

Komponen “strategi” dalam kurikulum berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan. Dalam pengembangan kurikulum, komponen ini akan menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pelatihan. Selain itu, apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, pendekatan dan metode, serta media yang akan digunakan, termasuk langkah-langkah kegiatan pelatihan. Komponen “strategi” dalam kurikulum dapat dilihat dalam deskripsi pelatihan dan silabus pelatihan. Isi silabus menampilkan metode dan alat bantu yang akan digunakan.

Penyelenggaraan pelatihan sesuai Kurikulum tahun 2009 dan 2015 dilakukan secara

klasikal dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktik lapangan. Alat Bantu atau media yang digunakan adalah *Overhead Projector* (OHP/OHT), papan tulis/*whiteboard*, *handout*, dan ATK. Sementara pada Kurikulum 2021, metode pembelajaran selain dilakukan secara klasikal, juga dapat diselenggarakan secara *blended learning* dan/atau jarak jauh (*online*) secara utuh (*full e-learning*). Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi, penugasan, simulasi, praktik lapang, dan presentasi.

Metode yang yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran pelatihan agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusriyanto (1991) dalam Bahrissalim dan Fauzan (2018) yaitu salah satu ciri program pelatihan yang efektif adalah penggunaan metode yang tepat.

D. Komponen Evaluasi

Komponen “evaluasi” merupakan alat untuk mengukur pencapaian kompetensi sesuai tujuan kurikulum. Komponen ini juga untuk melihat keberhasilan peserta dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum 2009 dan 2015 tidak mencantumkan cara evaluasi tapi dalam pelaksanaan biasanya menggunakan ujian tertulis, penilaian partisipasi dan penilaian praktiklapang.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Wiyanto (Widyaiswara Pusat Diklat SDM LHK) yang menyatakan bahwa “penilaian materi teori dalam pelatihan GANIS-PHPL BINHUT diujikan secara tertulis. Sementara itu, praktik dilakukan dengan pengamatan terhadap keaktifan peserta”.

Sesuai dengan Kurikulum 2021, evaluasi pembelajaran dilakukan dengan melaksanakan ujian komprehensif yang meliputi *pre-test*, *post-test*, keaktifan peserta selama mengikuti proses pembelajaran, penugasan, dan presentasi. Mata pelatihan yang diajarkan akan dievaluasi dengan metode evaluasi yang sesuai. Sebagai contoh: teori dengan ujian tulis, sedangkan ujian praktik dapat dilakukan dengan penugasan atau metode lain. Berdasarkan P.11/P2SDM/SET/DIK.2/9/2017, pembelajaran praktik adalah proses pembelajaran dengan cara menguji dan melaksanakan kegiatan secara nyata terhadap apa yang telah dipelajari dalam teori.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa prinsip dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan disusun sesuai dengan kebutuhan, perkembangan peraturan dan kebijakan, serta pelaksanaantugas.

Perubahan 4 komponen dalam Pelatihan GANIS-PHPL BINHUT, meliputi:

1. Komponen Tujuan

Penyelenggaraan pelatihan sesuai Kurikulum tahun 2009 dan 2015 dilakukan secara klasikal dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktik lapangan. Alat bantu atau media yang digunakan adalah OHP/OHT, papan tulis/*whiteboard*, *handout*, dan ATK. Sementara itu, sesuai Kurikulum 2021 pelatihan dapat dilakukan secara klasikal, *blended learning* dan/atau jarak jauh (*online*) secara utuh (*full e-learning*), dengan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, penugasan, simulasi, praktiklapang dan presentasi.

2. Komponen Isi/Materi

Isi/materi yang terdapat dalam ke-3 kurikulum sangat berbeda. Kurikulum 2009 hanya berisi kompetensi pembinaan hutan, sedangkan kurikulum 2015 dan 2021 berisi kompetensi pembinaan hutan, kompetensi pengelolaan lingkungan dan kompetensi pengelolaan sosial. Format kurikulum juga berbeda disesuaikan dengan bentuk pelatihan. Kurikulum 2009 dan 2015 menggunakan Format Kurikulum Umum, sedangkan kurikulum 2021 menggunakan Format Kurikulum Berbasis Standar Kompetensi.

3. Komponen Strategi

Penyelenggaraan pelatihan sesuai Kurikulum tahun 2009 dan 2015 dilakukan secara klasikal dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktik lapangan. Alat bantu atau media yang digunakan adalah OHP/OHT, papan tulis/*whiteboard*, *handout*, dan ATK. Sementara itu, sesuai Kurikulum 2021 pelatihan dapat dilakukan secara klasikal, *blended learning* dan/atau jarak jauh (*online*) secara utuh (*full e-learning*), dengan menggunakan metode

ceramah interaktif, diskusi, penugasan, simulasi, praktik lapang dan presentasi.

4. Komponen Evaluasi

Kurikulum 2009 dan 2015 tidak mencantumkan cara evaluasi tapi dalam pelaksanaan biasanya menggunakan ujian tertulis, penilaian partisipasi dan penilaian praktik lapang. Evaluasi pembelajaran sesuai kurikulum 2021 dilakukan melalui ujian komprehensif yang meliputi *pre-test*, *post-test*, keaktifan peserta selama mengikuti proses pembelajaran, penugasan, dan presentasi.

B. Rekomendasi

1. Kurikulum GANIS-PHPL BINHUT tahun 2021 yang terbaru terdiri dari 3 kompetensi utama yaitu mengendalikan kegiatan pembinaan hutan, melaksanakan kelola lingkungan, dan melaksanakan kelola sosial. Hal ini menyebabkan ruang lingkup kurikulum terlalu luas dalam pelaksanaan pelatihannya. Sebaiknya kurikulum dibuat perkompetensi utama walaupun nama GANIS-PHPL BINHUT-nyasama.
2. Perlu evaluasi kurikulum pelatihan GANIS-PHPL BINHUT secara menyeluruh dari peserta maupun widyaiswara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrissalim dan Fauzan. 2018. Evaluasi urikulum Pelatihan dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 13, No. 1, Februari 2018.
- BP2SDM. 2017. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: P.11/P2SDM/SET/DIK.2/9/2017 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Ferry, F., 2016. Pengembangan Kurikulum Diklat. Modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah. LAN. Jakarta. Jabar, CSA. 2011. Desain Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (Pengembangan Diklat Sistemik Model ADDIE). Disampaikan pada Seminar Penyusunan Draft Desain Kurikulum Diklat Manajemen Perkantoran pada Badan Diklat Propinsi DI Yogyakarta – 25 Mei 2011.
- Kamil, M. 2010. Model Pendidikan dan Pelatihan. Bandung. Alfabeta.
- KemenLHK. 2008. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- KemenLHK. 2014. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- KemenLHK. 2019. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi.
- Kurniasih, Imas, dan Berlin, S. 2014. Perancangan Pembelajaran Prosedur Pembuatan RPP yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Jakarta: Kata Pena.
- LAN. 2007. Pengembangan Kurikulum Modul Diklat Calon Widyaiswara.
- LAN. 2011. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pusdiklat SDM LHK. 2009a. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Diklat Kehutanan SK 27/DIK-2/2009 tentang Kurikulum dan Silabus GANIS-PHPL Pembinaan Hutan.
- Pusdiklat SDM LHK. 2009b. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Diklat Kehutanan SK 33/DIK-2/2009 tentang Kurikulum dan Silabus GANIS-PHPL Kelola Sosial.
- Pusdiklat SDM LHK. 2009c. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Diklat Kehutanan SK 34/DIK-2/2009 tentang Kurikulum dan Silabus GANIS-PHPL Kelola Lingkungan.

Pusdiklat SDM LHK. 2009d. Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK. 235/Diklat-2/2015 tentang Kurikulum Diklat GANIS-PHPL Pembinaan Hutan.

Pusdiklat SDM LHK. 2009e. Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Nomor: SK. 55 /Dik/PEPE/Dik-2/2/2021 tentang Kurikulum Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANIS-PHPLBINHUT).

Sukmadinata, N. S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



*"Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi.
Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba"*

~ Brian Dyson ~



UJI KOMPETENSI KEAHLIAN BIDANG TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN SEBAGAI PROSES PEMBUKTIAN KEMAMPUAN BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN TAHUN 2022 (Studi Kasus Sekolah Menengah Kejuruan Widya Nusantara Maros Sulawesi Selatan)

Oleh:

IDA NURMAYANTI

Widyaiswara Ahli Utama, Balai Diklat LHK Bogor

ABSTRACT

Competency test is an assessment process by collecting relevant evidences to determine whether a person is competent or not in a certain qualification. Those who are entitled to take competency test are vocational high school students who have completed learning materials at the high school. Centre for Environment and Forestry Education and Training has been certified and ratified by the National Professional Standardization Agency as a certification body. One of the schemes of the competency test in the field of forest resources conservation is Nature Tourism Guide. The scheme consists of two competency units, namely Unit Flora Inventory competency and competency unit to Guide Nature Tourism Visitors. The competency test follows all stages in accordance to certification scheme. In this paper, the stages of competency test are described. The final assessment result can be competent or incompetent.

Keyword: *competency test, forest resources conservation, Nature Tourism Guide*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pekerjaan akan dituntut penyelesaiannya secara efektif, efisien, akuntabel, mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta berwawasan lingkungan. Untuk memperoleh hasil kerja dengan cara penyelesaian tersebut diperlukan *“the right man in the right place”*, yaitu: tenaga kerja yang kompeten di bidang pekerjaan tersebut. Tenaga kerja yang kompeten dapat menjamin tercapainya tingkat produktivitas dan daya saing yang diharapkan. Oleh karena itu, para investor tidak tertarik lagi oleh tawaran *“tenaga kerja murah”* namun tidak kompeten; karena pada akhirnya mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama untuk mendidiknya. Para investor lebih memilih tenaga kerja siap pakai yang kompeten di bidang profesi yang diperlukan, yaitu mereka yang

memiliki sertifikat kompetensi. Demikian pula Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat sangat dituntut produktivitas dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, mereka harus kompeten di bidang pekerjaannya dan seyogianya mengikuti proses sertifikasi.

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). UKK dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kejuruan (LSK) atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha/industri.

UKK merupakan proses penilaian melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu kualifikasi tertentu.

Siswa yang berhak mengikuti UKK adalah siswa SMK aktif yang telah menuntaskan materi pembelajaran yang akan diujikan.

Untuk materi UKK disusun berdasarkan skema sertifikasi sesuai dengan jenjang kualifikasi peserta uji/asesi yang memuat kemampuan melaksanakan pekerjaan spesifik, operasional, dan/atau penjaminan mutu.

Soal UKK dapat berbentuk penugasan atau bentuk lain yang dinilai secara individual untuk membuat suatu produk sesuai tuntutan standar kompetensi.

Pada penilaian UKK, aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap diuji untuk menghasilkan 1 (satu) penilaian yaitu: kompeten atau belum kompeten. Pelaksanaan UKK tersebut dikelola oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Sedangkan bagi *stakeholder*, hasil UKK dijadikan sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja.

UKK bagi SMK memiliki keunggulan tersendiri yang dapat memenuhi kebutuhan industri bagi tenaga teknis dalam bidang Kehutanan. Dengan demikian, lulusan SMK Kehutanan dapat dipercaya memiliki daya saing tinggi karena telah sesuai dengan keahlian yang ditempuh selama pembelajaran.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) II Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sumber Daya Manusia (SDM) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dibentuk oleh Pusdiklat SDM LHK yang mempunyai komitmen membangun dan memelihara kompetensi alumni pelatihan, peserta didik SMK Kehutanan, dan alumni SMK Kehutanan secara profesional dan mandiri.

Pembentukan LSP II Pusdiklat SDM LHK dibuktikan dengan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 203/DIK/PDT/Dik.4/11/2016 tanggal 15 Nopember 2016 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusdiklat SDM LHK, 2016).

UKK yang dilaksanakan oleh LSP II Pusdiklat SDM LHK memiliki 4 (empat) skema sertifikasi yang sudah divalidasi dan disahkan oleh Badan Standarisasi Nasional Profesi (BNSP) yaitu skema Teknis Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan (TRRH), skema Teknis Konservasi Sumberdaya Hutan

(TKSDH), skema Teknis Pemanfaatan Hasil Hutan (TPHH), dan skema Teknis Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH). Skema-skema sertifikasi ini yang nantinya akan menjadi penilaian khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik.

Pada tulisan ini akan dikaji tentang UKK bidang TKSDH di lokasi SMK Widya Nusantara Maros, Sulawesi Selatan dengan skema sertifikasi Pemanduan Wisata Alam. Skema ini memiliki 2 (dua) kode unit yaitu A.024011.002.01 Melakukan Inventarisasi Flora (SKKNI No. 205 tahun 2013 terkait bidang kerja Pengendali Ekosistem Hutan), dan KHT. PH02.033.1 yaitu Memandu Pengunjung Wisata Alam (SKKNI Nomor 68 tahun 2013 terkait bidang kerja SDM pada Organisasi KPH) (Kemenakertrans, 2013a,b).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana pencapaian tujuan UKK yang dilaksanakan di SMK Kehutanan Widya Nusantara Maros Sulawesi Selatan, terutama menyangkut aspek keterampilan teknis Kehutanan?

C. Tujuan

Dari rumusan permasalahan, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Mendeskripsikan proses pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian bidang TKSDH bagi siswa SMK Kehutanan Widya Nusantara Maros Sulawesi Selatan.
- b. Mengetahui pencapaian tujuan Uji Kompetensi Keahlian bidang TKSDH bagi siswa SMK Kehutanan Widya Nusantara Maros Sulawesi Selatan.

II. METODOLOGI

Kajian observasi pengumpulan data dan informasi dilaksanakan pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 yaitu selama proses UKK bidang TKSDH diselenggarakan oleh LSP II Pusat Diklat SDM LHK.

Metode pengumpulan data dan informasi diperoleh dari hasil observasi selama melakukan UKK, hasil wawancara terhadap siswa, guru dan penyelenggara UKK, data sekunder hasil evaluasi

pelaksanaan UKK, serta penilaian observasi dan daftar hadir. Selanjutnya data yang diperoleh dikombinasikan dengan literatur yang relevan tentang UKK. Pengolahan data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Kegiatan UKK

Tenaga kerja yang kompeten mempunyai ciri-ciri: memiliki, menghayati, dan menguasai pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang tepat dalam melaksanakan tugasnya sehingga kondisi kinerja yang efektif dapat tercapai. Tenaga kerja yang kompeten akan meningkatkan kualitas diri tenaga kerja itu sendiri dan secara signifikan akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga baik di sektor publik maupun sektor privat/swasta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi membuat Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK tahun 2021/2022.

Dalam Pedoman tersebut dinyatakan bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan UKK tahun pelajaran 2021/2022, maka ditetapkan mekanisme dalam Pelaksanaan UKK. Untuk pelaksanaan UKK, SMK dapat memilih salah satu atau beberapa dari jenis skema penyelenggaraan ujian yaitu ujian melalui LSP Pihak Kedua (LSP-P2): LSP yang didirikan oleh dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA) atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia yang bernaung dalam lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya, dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP (Kemendikbud, 2021).

Dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja diperlukan berbagai instrumen utama diantaranya adalah standar kompetensi. Salah satu standar kompetensi yang dapat digunakan untuk uji kompetensi adalah Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI berisikan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tenaga profesional kehutanan bidang TKSDH harus memiliki kompetensi yang diakui melalui sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menunjang pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga TKSDH diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Tenaga Teknis.

Dengan dirumuskannya SKKNI maka terjalin hubungan yang bersinergi antara pengguna (perusahaan swasta, BUMN, dan/atau pemerintah) dengan lembaga-lembaga pelatihan kerja maupun lembaga pendidikan/ perguruan tinggi dalam merumuskan standar kualifikasi SDM yang dibutuhkan guna menjamin kesinambungan dan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Dalam hal ini lembaga diklat/atau perguruan tinggi akan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan dalam mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan dalam rangka penyediaan tenaga kerja kompeten.

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan intervensi Pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan UKK bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai Kompetensi Keahlian yang ditempuh selama masa pembelajaran di SMK. UKK dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian praktik untuk menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku.

Uji kompetensi keahlian ini biasanya dilaksanakan di sekolah SMK Kehutanan pada tingkat akhir pembelajaran selama 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, UKK dilaksanakan pada tahun ke 3 (tiga) sebelum pelaksanaan ujian sekolah. Pelaksanaan UKK ini biasanya terdiri dari pengujian internal maupun eksternal atau Asesor yang memiliki sertifikat BNSP yang layak untuk dapat menguji serta ditunjuk dari LSP. UKK dilaksanakan dalam satu waktu, sehingga diharapkan akan memperoleh hasil penilaian kompetensi siswa yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

UKK bagi anak didik SMK Kehutanan dilaksanakan menggunakan standar yang ditetapkan oleh industri, LSP, dan/atau perangkat uji yang dikeluarkan oleh KLHK dalam hal ini LSP II Pusdiklat SDM LHK. Tempat uji kompetensi sudah diverifikasi oleh Asesor yang ditunjuk serta dinyatakan layak untuk digunakan sebagai tempat

uji kompetensi (TUK). Semua ini dibuktikan dengan Berita Acara verifikasi TUK, verifikasi kelayakan alat-alat yang akan digunakan, serta skema sertifikasi yang telah divalidasi oleh tim manajemen mutu dan ketua LSP. Nilai UKK diperhitungkan sebagai Nilai Ujian Sekolah untuk mata pelajaran kompetensi kejuruan.

Sebelum siswa mengikuti proses pelaksanaan UKK, siswa dapat berlatih agar pada saat diuji siswa telah memahami apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, untuk mendukung kemampuan siswa dan untuk kejelasan penilaian maka dianggap perlu untuk membagikan perangkat yang dapat digunakan (Budiyono, 2011). Perangkat UKK yang dikeluarkan oleh KLHK bersifat terbuka dan peserta uji dapat berlatih menggunakan perangkat uji tersebut sebelum pelaksanaan uji.

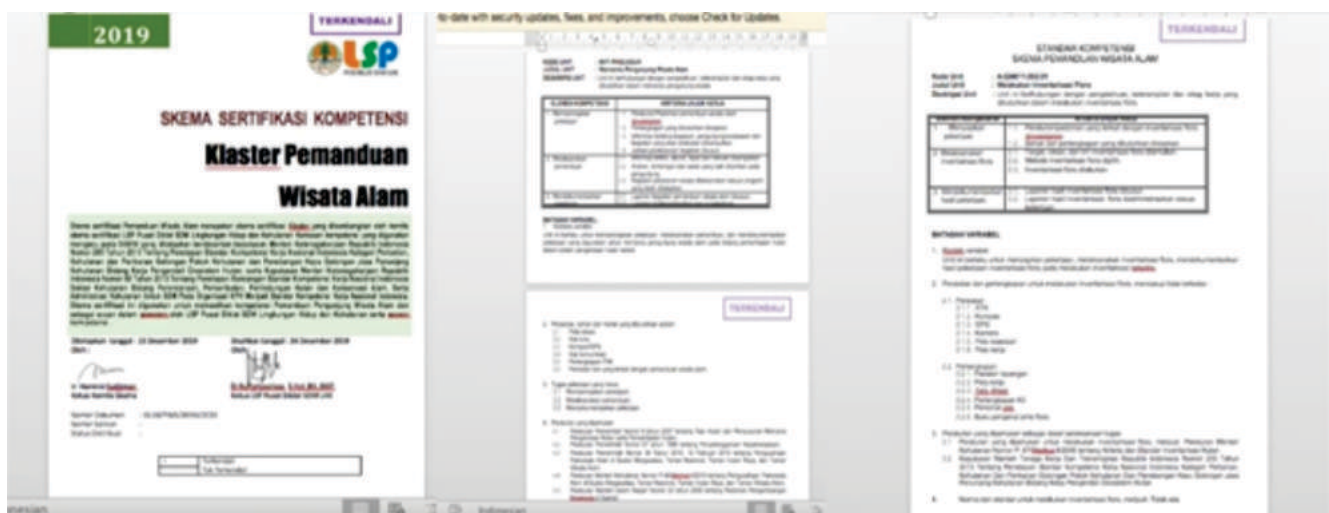
Bidang TKSDH memiliki 1 (satu) skema sertifikasi Klaster yaitu Pemanduan Wisata Alam dengan 2 (dua) unit kompetensi yaitu Unit Kompetensi I: Melakukan Inventarisasi Flora dan Unit Kompetensi II: Memandu Pengunjung Wisata Alam. Skema Sertifikasi Bidang TKSDH dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.

Proses pelaksanaan UKK bidang TKSDH ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari untuk 10 (sepuluh) orang siswa SMK Kehutanan/Asesi. Setiap asesi harus menyelesaikan urutan pelaksanaan UKK. Adapun tahapan pelaksanaan UKK adalah sebagai berikut:

a. **Melakukan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK).** Asesor harus melakukan verifikasi TUK untuk menilai kelayakan lokasi/tempat uji. Hal tersebut dilakukan karena selama ini TUK yang

digunakan masih bersatus TUK sewaktu bukan TUK mandiri. Oleh karena itu, setiap kali akan dilaksanakan UKK harus dilakukan verifikasi TUK yang dilampirkan dengan Berita Acara verifikasi TUK. Berita Acara verifikasi TUK dikumpulkan di LSP.

- b. **Melakukan verifikasi alat-alat yang digunakan.** Alat-alat yang akan digunakan UKK wajib diverifikasi layak atau tidaknya serta jumlah yang harus dimiliki. Alat yang digunakan adalah: tali tambang (dengan ukuran 20x20m, 10x10m, 5x5m dan 2x2m), patok kayu 30 cm (16 buah), GPS, kompas, Phi-band, roll meter, *tally sheet*, alat tulis, APD, peta kawasan, peta kerja, buku identifikasi flora, teropong, program pemanduan wisata alam, perlengkapan K3, kalkulator, alat komunikasi (*Handy Talky*), dan Kamera.
- c. **Melakukan uji tulis.** Semua asesi mengikuti ujian tertulis yang sudah disiapkan oleh administrasi LSP Pusdiklat SDM LHK dengan alokasi waktu sekitar 60 menit.
- d. **Melakukan UKK.** Setiap asesi melaksanakan UKK untuk unit kompetensi 1 rentang waktu adalah 3 (tiga) jam (setara 180 menit), kemudian dilanjutkan dengan menghitung Indeks Nilai Penting (INP) dari data-data yang diperoleh. Sedangkan untuk unit kompetensi 2 (dua) waktunya adalah 60 menit.
- e. **Melakukan tes lisan.** Tes ini dilakukan untuk menggali pengetahuan dari asesi sehingga memahami juga wawasan dan pengetahuan tentang apa yang dilakukan selain keterampilan pada saat pelaksanaan UKK.



Gambar 1. Skema Sertifikasi Bidang TKSDH

- f. **Mengadministrasikan kegiatan.** Kegiatan ini adalah lanjutan dari tahapan membuat laporan, karena berkas laporan tadi harus diserahkan kepada atasan yang memberi tugas atau kepada pengelola arsip untuk diarsipkan dan disimpan dengan rapi di lemari arsip.
- g. **Membuat Laporan.** Setelah selesai pelaksanaan unjuk kerja di lapangan, tahapan selanjutnya adalah membuat laporan, baik laporan melakukan inventarisasi flora maupun membuat laporan memandu pengunjung wisata alam.
- h. **Melakukan pemberkasan UKK.** Kegiatan ini adalah proses akhir dari semua kegiatan UKK. Pada kegiatan ini, asesor meminta asesesi satu per satu untuk menghadap dan melihat semua pekerjaan yang sudah diujikan. Selanjutnya, asesor menyatakan asesesi tersebut kompeten atau belum kompeten.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan UKK tersebut, seorang asesor membutuhkan waktu sekitar 10 (sepuluh) hari untuk melakukan *assessment/* pengujian terhadap 10 (sepuluh) orang siswa SMK Kehutanan (asesesi). Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di SMK Kehutanan Widya Nusantara Maros, Sulawesi Selatan terhadap 9 (sembilan) orang asesesi (siswa).

B. Pencapaian Tujuan Pelaksanaan UKK

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan SMK terutama menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan antara lain bahwa pendidikan di SMK dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kompetensi serta pada akhir pendidikan peserta didik yang memenuhi persyaratan akan memperoleh ijazah dan sertifikat kompetensi (Pemerintah Indonesia, 2003). Selanjutnya, untuk dapat diterima di dunia kerja/industri (Du/Di) seseorang harus kompeten secara legal formal antara lain dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi sebagai paspor keterampilan berbasis kompetensi.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika SMK akan melakukan UKK yaitu: a) SMK yang telah memenuhi persyaratan sebagai

Tempat Uji Kompetensi (TUK), bekerjasama dengan LSP/LSK untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai skema sertifikasi kemasan kualifikasi, okupasi, atau klaster dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan; b) LSP/LSK wajib menyiapkan penguji/asesor dan materi uji kompetensi; c) Asesor Kompetensi harus mempunyai sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP dan atau Lembaga lain yang diakui, dan sertifikat tersebut masih belum habis masa berlakunya; d) LSP/LSK menyiapkan skema sertifikasi dan materi uji kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan; e) LSP/LSK wajib menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta uji yang dinyatakan lulus; f) Kegiatan uji kompetensi dengan LSP/LSK dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran; g) Setiap siswa SMK yang mengikuti uji kompetensi diupayakan untuk memperoleh sertifikat kompetensi setara kualifikasi, okupasi, klaster besar (>6 unit kompetensi), atau kombinasi beberapa klaster dengan total minimal 7 unit kompetensi (Kemendikbud, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk a) mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar/kompetensi peserta didik, b) mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, c) mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, d) mengetahui efektivitas proses pembelajaran dan e) mengetahui pencapaian kurikulum (Kemendikbud, 2018).

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang 3 (tiga) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk UKK dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Kompeten/Profesi. Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan peserta yang memuat kemampuan melaksanakan pekerjaan spesifik, operasional dan penjaminan mutu.

Proses kegiatan UKK yang dilakukan di SMK Kehutanan Widya Nusantara Maros, Sulawesi Selatan ini sudah sesuai dengan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dari LSP II Pusdiklat SDM LHK tentang pelaksanaan UKK bagi siswa SMK Kehutanan yaitu pengajuan dari

sekolah untuk melaksanakan UKK. Selanjutnya, pengajuan tersebut ditindak lanjuti oleh LSP dengan penunjukan asesor yang akan ditugaskan.

TUK dan semua alat-alat yang akan digunakan telah diverifikasi oleh asesor. Lokasi TUK di KHDTK Tabo-Tabo Sulawesi Selatan memiliki topografi menanjak dan berliku serta cukup terjal, tetapi sangat cocok bila dilaksanakan UKK untuk bidang TKSDH ini. Siswa-siswi atau asesi telah berlatih dengan baik oleh guru bidang TKSDH sesuai dengan skema Pemanduan Wisata Alam. Jumlah asesi yang mengikuti UKK ini adalah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang putri dan 6 (enam) orang putra. Karena sudah berlatih dengan baik, semua kegiatan pada pelaksanaan UKK ini dapat berjalan dengan sangat baik bahkan ada 1 (satu) asesi memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Semua asesi dinyatakan kompeten. Hal ini menunjukkan bahwa bila siswa berlatih secara serius, maka hasil yang akan diperoleh sangat baik.

Pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan UKK di SMK Kehutanan Widya Nusantara Maros, Sulawesi Selatan sangat baik dalam hal penguasaan materi baik teori (uji tertulis) maupun praktik (pelaksanaan UKK). Semua proses pelaksanaan setiap tahapan berjalan dengan sangat baik dan sangat serius, sehingga semua asesi dinyatakan kompeten. Walaupun, kecakapan

atau kecekatan dari masing-masing asesi berbeda-beda. Ada yang cekatan dan cepat dalam melakukannya dan benar. Namun, ada pula yang masih harus mendapatkan bimbingan. Tetapi bimbingan ini dilakukan agar asesi menyadari kekurangannya saat pelaksanaan UKK.

Bimbingan ini tentunya harus dimanfaatkan dengan baik oleh asesi sebagai motivasi dalam melakukan uji kompetensi keahlian. Pemberian motivasi dari asesor sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri asesi. Sebagai contoh: asesi yang awalnya merasa tidak mampu melakukan atau *nervous* akhirnya asesi berhasil menghilangkan rasa *nervous* dan rasa ketakutan gagal dengan mau mencoba dengan keyakinan bisa melakukan. Maka akhirnya asesi tersebut berhasil melakukannya. Pelaksanaan UKK di KHDTK Tabo-tabo dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.

Pada pelaksanaan UKK melalui skema penyelenggaraan LSP/LSK atau skema lainnya yang mana sertifikasinya tidak memunculkan skor, asesor wajib mengonversi capaian kompetensi peserta uji dalam rentang 0 sampai 100 (Kemendikbud, 2021).

Kriteria pencapaian kompetensi hasil konversi dari UKK melalui skema penyelenggaraan LSP/LSK, atau skema lainnya yang pada sertifikasinya tidak memunculkan skor dapat diuraikan pada Tabel 1 sebagai berikut:



Gambar 2. Kegiatan Pelaksanaan UKK di KHDTK Tabo-Tabo (Dok. Nurmayanti, I, 2022)

Tabel 1. Kriteria pencapaian kompetensi hasil UKK

Kriteria	Rentang Skor*	Predikat
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja	80-90	Kompeten
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja dengan tambahan mutu/kualitas hasil pekerjaan/penugasan atau menunjukkan kreativitas yang luar biasa	91-100	Sangat Kompeten

Kekurangan dari pelaksanaan UKK ini adalah TUK yang memiliki medan yang cukup berat sehingga diperlukan fisik yang kuat, spesies tumbuhan yang ada relatif sama jenisnya, faktor alam yaitu hujan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ini sehingga tidak mungkin dilanjutkan, harus istirahat dulu. Namun, kelebihanannya adalah asesi yang cukup berlatih sehingga pada saat pelaksanaan hasilnya sangat baik. Untuk unit kompetensi memandu pengunjung wisata alam, tersedianya spot wisata yang sangat beragam memudahkan dalam mengimplementasikan seperti halnya yang dialami oleh seorang pemandu, serta akomodasi dan transportasi yang sangat menunjang dalam pelaksanaan ini karena semua panitia menyediakan alat atau sarana lainnya bila diperlukan.

Secara umum isi sertifikat kompetensi minimal memuat identitas peserta uji, nama kompetensi keahlian, dan daftar kompetensi/unit-unit kompetensi yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten. Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta uji yang lulus UKK (Kemendikbud, 2021). Proses kegiatan UKK di SMK Kehutanan Widya Nusantara Maros, Sulawesi Selatan terhadap 9 (Sembilan) orang asesinya (siswanya) berjalan dengan baik dan semua asesi dinyatakan kompeten.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. UKK bidang TKSDH dilaksanakan dengan tahapan yang berurutan, sehingga hasil yang diperoleh optimal. Urutannya adalah melakukan verifikasi lokasi dan alat-alat, uji tulis dan uji lisan, pelaksanaan UKK, menyusun laporan pelaksanaan serta melakukan pengadministrasian kegiatan.
2. Tujuan pelaksanaan UKK yang terdapat pada SOP dan skema sertifikasi dapat dicapai oleh asesi dengan melaksanakan semua tahapan-tahapan pelaksanaan UKK sesuai dengan skema sertifikasi dan dengan hasil kompeten.

B. Rekomendasi

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian tujuan pelaksanaan UKK sudah baik dan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi hambatan

atau kendala dalam pelaksanaan UKK ini terutama adalah waktu pelaksanaan UKK. UKK sebaiknya tidak dilaksanakan di bulan-bulan musim hujan karena akan terkendala saat pelaksanaannya. Selain itu, monitoring dan evaluasi dari pihak administrasi LSP Pusdiklat SDM LHK harus dilakukan untuk melihat secara langsung proses kegiatan UKK ini.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyono, 2011. Uji Kompetensi Keahlian Siswa Sekolah Menengah Kejuruan, Lembaran Ilmu Kependidikan Jilid 40 No. 1. Universitas Negeri Semarang.

Pusdiklat SDM LHK. 2016. Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 203/DIK/PDT/Dik.4/11/2016. Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bogor.

Kemenakertrans. 2013a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penetapan RSKKNI Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Hasil Hutan dan Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam serta Administrasi Kehutanan untuk Sumberdaya Manusia pada Organisasi.

Kemenakertrans. 2013b. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 205 Tahun 2013 tentang Penetapan RSKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan Penebangan Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan Bidang Kerja Pengendalian Ekosistem Hutan.

Kemendikbud. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Kemendikbud. 2021. Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2021/2022. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Jakarta.

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN HAK

Oleh:

IMAM SAFARI HIDAYAT

Widyaiswara Ali Madya, Balai Diklat LHK Kadipaten

ABSTRACT

Private Forest is being a capital in future forestry development, but legal certainty in running a business in private forest is often hampered due to the lack of knowledge in regards to regulations. Farmers often do not have knowledge of wood volume they have and how to duplicate and fill in the form of private forest administration. This results in significant revenue loss in harvesting private forest. The purpose of writing this paper is to provide knowledge about private forest administration. Literature study on the regulations which are related to private forest administration was carried out. Farmers' knowledge in good private forest administration is expected to be a solution for increasing farmers knowledge in calculating the volume of timber and market opportunities, so as to increase the economic value of private forest timber.

Keywords: *Private forest, private forest administration, regulations*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam hayati yang cukup berperan dalam pembangunan nasional. Pemanfaatan hutan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkesinambungan merupakan prinsip utama dalam pengelolaan hutan.

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang menguasai hajat hidup orang banyak karena selain mempunyai manfaat langsung seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, hutan juga mempunyai manfaat tidak langsung berupa jasa lindung, konservasi tanah dan air dan jasa rekreasi. Oleh karena itu, hutan perlu dilindungi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan lestari sesuai dengan fungsinya.

Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan. (KemenLHK, 2021). Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang

kehutanan. Dengan penatausahaan hasil hutan yang berjalan dengan tertib dan lancar, diharapkan kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai.

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Hak mempunyai peran penting dalam pemasaran hasil hutan terutama pemenuhan dokumen pengangkutan sebagai bukti legalitas kayu rakyat. Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) merupakan bukti legalitas Kayu dari Hutan Hak dimana diperlukan untuk memasok keperluan lokal ataupun industri pengolahan kayu.

Seperti pada pertimbangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tujuan Penatausahaan Hasil Hutan Hak adalah meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi rakyat, sehingga ketentuan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan memberikan kemudahan melalui penerapan *self assessment* dalam penerbitan dokumen angkutan dengan disertai penegakan hukum yang tegas dan Penatausahaan Hasil Hutan Hak terus mengalami penyempurnaan dimulai dari bentuk pelaporan, Format, penggandaan, pembuatannya serta pengisiannya yang disederhanakan.

Pada kenyataannya, pengetahuan petani mengenai penebangan hingga penjualan sangatlah kurang. Hal ini di buktikan dengan lemahnya petani dalam menaksir volume kayu yang dimiliki, bagaimana mengupayakan agar penjualan bisa lebih meningkat, dan menyiapkan dokumen yang diperlukan jika melakukan penjualan kayu ke industri. Sejalan dengan hal ini, penelitian Effendi (2010) menyatakan ada beberapa kelompok permasalahan pada saluran tata niaga kayu rakyat: Petani sebagai produsen kayu rakyat: a) Organisasi petani lemah, b) kemampuan ekonomi rendah, c) profit margin rendah (kecil), d) pengetahuan/keterampilan rendah, dan e) sharing terhadap kerusakan lingkungan besar (erosi, tata air, oksigen, iklim mikro, mengurangi defisit bahan baku nasional. Sedangkan pada kelompok pedagang perantara/ tengkulak: a) pedagang membeli dalam bentuk tegakan dengan harga rendah, b) margin profit cukup besar, c) *sharing* terhadap lingkungan rendah, d) informasi pasar ke produsen kurang lancar. Sedangkan permasalahan dari pengusaha/ eksportir kayu olahan: a) pasokan tidak kontinyu, b) menghendaki kualitas kayu yang tinggi, c) harga terlalu rendah, d) perhatian terhadap lingkungan kurang.

Kurangnya pengetahuan petani dalam menerapkan teknis aturan-aturan di lapangan sering menjadi penghambat pemasaran kayu hak. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Dokumen dalam Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Hak yang dibuat sulit dilaksanakan di lapangan (Musdi, Hardjanto & Sudarwati, 2021). Pengetahuan petani terkait dengan kriteria pohon yang siap panen, manfaat yang diperoleh dari usaha hutan rakyat, serta pengolahan hasil hutan masih memerlukan peningkatan.

Para petani/pemilik hutan Hak sering berpendapat bahwa lebih baik tidak menggunakan Dokumen penatausahaan hutan hak dari pada harus berbelit-belit dengan urusan administrasi, dan menjualnya ke para bandar/tengkulak dengan harga murah, dimana para tengkulak memainkan harga dan melengkapi dokumen penatausahaanya untuk dijual ke industri ataupun pasar lokal dengan harga yang sudah tinggi.

Sejalan dengan hasil penelitian Darusman & Wijayanto (2007), sistem tata niaga kayu rakyat

cenderung merugikan petani, namun menguntungkan pengusaha. Hal ini dikarenakan: (1) penjualan dalam bentuk tegakan (borongan), sehingga keuntungan rendah. Selain itu, tengkulak melakukan pembelian kayu dari petani dengan sistem ijon; (2) penjualan dilakukan dalam bentuk kayu bulat ke luar daerah, sehingga nilai tambah bagi masyarakat rendah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin dianalisa pada tulisan ini adalah: apa saja kendala yang dihadapi para petani dalam menerapkan Penatausahaan Hasil Hutan Hak?

C. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi para petani dalam menerapkan Penatausahaan Hasil Hutan Hak.

II. METODOLOGI

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, pengamatan, dan studi pustaka terhadap perkembangan peraturan mengenai Penatausahaan Hutan Hak yang telah dilakukan dalam beberapa periode.

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks (Sarosa, 2017).

Wawancara dilakukan dengan 10 orang petani hutan rakyat Dusun Bingbin Desa Cibuang Kabupaten Kuningan dan 2 orang penyuluh kehutanan pada bulan Januari 2022. Analisis data dilakukan secara analisis deskriptif yang bertujuan menjelaskan sesuatu seperti apa adanya secara lebih mendalam (Syahadat & Sabarudin, 2014). Peraturan-peraturan dianalisa terkait dengan kemampuan pengetahuan petani di lapangan. Berdasarkan hasil analisa tersebut, peraturan yang masih relevan bagian-bagiannya direkomendasikan untuk tetap digunakan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi di Lapangan Penatausahaan Hasil Hutan Hak

Pada hutan hak, petani adalah pemilik lahan. Petani bekerja pada kebun/tanahnya masing-masing.

Petani memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pembuatan dokumen pada penatausahaan hasil hutan. Data diambil dengan metode wawancara untuk lebih mendukung dalam analisis deskriptif. Kendala-kendala tersebut adalah: petani belum memahami cara menghitung atau memperkirakan volume kayu yang dimilikinya. Karena kurangnya pengetahuan dalam memperkirakan volume kayu, maka petani menjual kayu dalam bentuk pohon berdiri. Petani tidak mengetahui taksiran volume kayu tersebut sehingga mengalami kerugian dan yang mendapatkan keuntungan adalah para pengepul kayu hutan hak.

Kendala selanjutnya adalah masalah pasar. Berdasarkan hasil wawancara, secara umum petani masih kesulitan dalam mengakses pasar. Kedekatan akses ke kota Kuningan yang hanya beberapa menit saja dari Dusun Bingbin masih jauh dari kondisi ideal Pemasaran Kayu dari Hutan Hak.

Kurangnya akses pasar bagi petani hutan hak menyebabkan kerugian petani hutan hak. Kebutuhan industri yang cukup besar tidak dirasakan oleh petani, karena suplai kayu untuk industri perlu memenuhi standar fisik kayu dan standar dokumen penata-usahaan hasil hutan. Kurangnya pengetahuan tentang standar fisik kayu dan standar dokumen penata-usahaan hasil hutan dirasakan sangat menyulitkan para petani untuk menjual kayunya ke industri dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan lokal.

Dengan adanya masalah pemasaran penjualan pohon jenis kehutanan para petani tidak mau lagi menanam pohon jenis kehutanan. Selain masalah pemasaran, berdasarkan hasil wawancara dengan petani, pohon jenis kehutanan memerlukan waktu lama untuk siap panen dan tidak menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan dengan lamanya waktu panen. Sehingga perkembangan penanaman pohon di lapangan akan mengalami hambatan dan berpindah ke komoditi perkebunan antara lain:

kopi. Kopi dalam jangka waktu yang relatif singkat dapat menghasilkan. Demikian pula dengan komoditas pertanian yang lebih cepat menghasilkan uang.

Kendala lain di lapangan adalah dukungan untuk peningkatan kapasitas pemilik hutan hak oleh penyuluh kehutanan dalam hal Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Hak masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat di lapangan yaitu salah satunya adalah belum digunakannya Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dalam penjualan kayu hasil hutan hak. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, mereka belum menggunakan SAKR karena kesulitan dalam pengisian dokumen tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 pasal 291 mengenai peningkatan kapasitas pemilik hutan hak disebutkan bahwa “masyarakat pemilik hutan hak berhak mendapatkan pendampingan dari penyuluh kehutanan” (ayat 1) serta “Dinas Provinsi dan/atau UPT dapat memberikan pembekalan kepada penyuluh kehutanan” (ayat 2). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas Petani dan Penyuluh Kehutanan dalam Penatausahaan Hasil Hutan Hak sangat diperlukan di lapangan.

B. Mekanisme Penatausahaan Hasil Hutan pada Hutan Hak

Pengaturan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dimaksudkan untuk melindungi hak privat dan memberikan kepastian hukum dalam kepemilikan, penguasaan dan pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Tujuannya adalah untuk menjamin ketertiban peredaran hasil hutan kayu dari hutan hak dan ketersediaan data dan informasi.

Pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilakukan oleh pemilik hutan hak yang bersangkutan dan tidak memerlukan izin penebangan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 pasal 285 (Ayat 1).

Selain itu, berdasarkan pasal 285 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan tersebut, penetapan jenis kayu, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah dilakukan oleh pemilik hutan hak. Hasil tebangan dapat langsung diolah menjadi kayu olahan rakyat di tempat penebangan.

Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 pasal 288 ayat 1 “SAKR diterbitkan oleh pemilik kayu budidaya dari Hutan Hak dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hutan.”

Pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyat dilengkapi SAKR yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis (GANIS) PHPL bidang Pengujian Kayu Bulat. Penggunaan SAKR hanya untuk hasil hutan kayu budi daya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi yang di dalamnya mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara (KemenLHK, 2021). Seluruh hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari Jawa dan Bali menggunakan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan Nota Angkutan, diluar Jawa dan Bali terbatas pada jenis-jenis yang ditentukan kecuali ada penambahan dengan keputusan dari Kepala Dinas Provinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada Kepala Balai Pemanfaatan Hutan Produksi di wilayahnya.

Alur Dokumen SAKR pada penatausahaan hasil hutan (PUHH) hutan hak ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar1. Alur Penatusahaan Hasil Hutan (PUHH) Hutan Hak

C. Dokumen PUHH Hutan Hak

Blanko/Dokumen dalam pengangkutan asil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak hanya ada 2 yaitu SAKR dan Nota Angkutan, untuk petani yang pengetahuan yang harus dimiliki berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 bahwa pasal 285 ayat ayat 2 “Pemanfaatan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan perhitungan jumlah oleh pemilik hutan hak.” Untuk mencapai pemenuhan peraturan diatas perlu didukung dengan blanko lainnya yang terdapat dalam peraturan-peraturan sebelumnya serta cara pengisiannya.

Maka beberapa blanko yang bisa diterapkan untuk pelaksanaan peraturan ini diantaranya adalah:

- Blanko DK.A.101.a.1 yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.126/ Menhut-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan. Blanko ini bisa dijadikan acuan dalam survey potensi kayu hutan hak, agar pemilik mengetahui seberapa besar potensi yang dimilikinya sehingga bisa mempertimbangkan harga jual.
- Blanko DKB/DKO terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. No.30/ Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak. Blanko Daftar Kayu Bulat/ Daftar Kayu Olahan digunakan sebagai lampiran SAKR atau nota angkutan.
- Surat Angkutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SAKR adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak.

D. Tata Cara Pengisian Blanko/Dokumen PUHH Hutan Hak

Berdasarkan wawancara dengan Petani di Dusun Bingbin Kabupaten Kuningan, petani belum terbiasa mengisi blanko Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) untuk penjualan tegakannya. Selain dokumen SAKR para petani perlu dibekali cara mengisi beberapa blanko untuk mempermudah pengisiannya. Blanko yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui volume kayu yang dimilikinya dan kelancaran dalam mengisi dokumen utama PUHH Hutan Hak yaitu SAKR.

Tata cara pengisian dari masing - masing blanko pembantu atau blanko untuk penatausahaan hasil hutan adalah sebagai berikut: Blanko DK.A.101.a.1 adalah blanko Laporan Hasil Cruising (LHC) Petak Kerja Tebangan seperti pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.126/ Menhut-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan (Kemenhut, 2003). Blanko tersebut digunakan sebagai blanko survey potensi hutan hak. Bentuk blanko dapat diperbaiki sesuai dengan kebutuhan pada hutan hak. Untuk kegiatan ini diperlukan alat pengukur tinggi pohon. Untuk lebih memudahkan di lapangan maka digunakan *christen meter* karena cara penggunaannya yang sederhana. Selanjutnya, sebagai alat pengukur diameter dapat digunakan *phiband* atau alat meteran yang biasa digunakan oleh penjahit.

Blanko survey potensi Hutan hak ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini.

SURVEY POTENSI HUTAN RAKYAT

Nama Petani Hutan Hak : _____
 Lokasi Hutan Hak : _____
 Uraian Hutan Hak : _____

No.	No. Pohon	Jenis Pohon	Diameter (cm)	Tinggi Pohon (Mata Cabang)	Volume (m ³)	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

Gambar 2. Blanko Survey Potensi Hutan Hak

Berdasarkan wawancara dengan para petani, petani masih mengalami kesulitan dalam menentukan cara pengukuran untuk tinggi bebas cabang.

Cara pengukuran pohon sederhana untuk tinggi bebas cabang adalah dengan memakai *cristen meter*. Selanjutnya mengukur diameter dilakukan dengan menggunakan meteran penjahit. Maka akan diperoleh keliling pohon. Keliling pohon dikonversi menjadi diameter dengan rumus $\phi (\pi) = 3,14$.

$$d = \frac{Kel}{\pi}$$

perhitungan volume pohon berdiri ditentukan dengan rumus:

$$vol = 0,7854 \times d^2 \times t \times f$$

Keterangan:

d: diameter pohon berdiri,

t : tinggi pohon,

f : faktor bentuk Jati = 0,6 dan lainnya = 0,7

Kesulitan yang dihadapi petani adalah mengukur dan menghitung potensi hutan hak yang mereka miliki. Ketidaktahuan petani kadang dimanfaatkan para tengkulak untuk menawar tegakan dengan harga murah. Peran dari petugas lapangan untuk membina para petani sangatlah menentukan kesuksesan dalam Penatausahaan Hasil Hutan Hak.

Hal lain yang diperlukan petani hutan rakyat adalah cara pengisian Daftar Kayu Bulat (DKB) atau Daftar Kayu Olahan (DKO) seperti pada Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. No.30/Menhut-II/2012 tentang Penatusahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak (Kemenhut, 2012). Blanko DKB atau DKO bukan merupakan blanko yang wajib dibuat untuk menyertai SAKR, atau Nota Angkutan di Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021, namun sangat diperlukan guna mengetahui kebenaran antara fisik dan dokumen SAKR yang diangkut.

Pada dasarnya perhitungan Kayu Bulat sama dengan Kayu Olahan yaitu menghitung volume tabung dan balok. Aturan untuk perhitungan kayu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: 8911:2020 tentang pengukuran dan penetapan isi kayu bundar. Pada SNI ini tidak lagi dibedakan pengukuran Kayu Bundar Rimba dan Kayu Bundar Jati (BNSP, 2020).

Penulisan panjang adalah dalam kelipatan 10 cm. Diameter adalah rata-rata diameter ujung dan diameter pangkal dalam satuan sentimeter penuh, dengan cara mengukur diameter terpendek dan terpanjang melalui pusat bontos. Volume dihitung dengan rumus:

$$vol = 0,7852 \times d^2 \times p$$

Cacat yang dapat mengurangi isi kayu bulat yaitu cacat yang berhubungan dengan gubal kayu bulat seperti lubang gerek besar dengan jumlah 10 bh/tmp atau pun gubal busuk. Pada prinsipnya cacat ini menganggap bahwa bagian luar dari kayu bulat adalah bagian yang tidak masuk kedalam perhitungan isi. Contoh kayu yang terkena serangan gubal busuk dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Kayu dengan Cacat Gubal Busuk

$$Isi Cg = Isi Kotor - Ib$$

Isi Cg = Isi Cacat Gubal
Ib = Isi bersih

Selanjutnya cacat bontos. Yang termasuk cacat bontos adalah: Gerowong dan Teras busuk. Cara menghitung cacat tersebut adalah dengan cara membuat kotak segi 4 pada area cacat tersebut. Diameter cacat adalah rata-rata lebar dan panjang kotak tersebut. Adapun contoh kayu yang terdapat cacat gubal dapat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Kayu dengan Cacat Gubal Busuk

$$IB = Isi Kotor - Icb$$

Isi Cg = Isi Cacat Gubal
Icb = Isi Cacat Bontos (\varnothing^2)

1. Pengukuran kayu olahan untuk pengisian pada lembar DKO

Jenis kayu olahan yaitu: Broti, Papan Lebar, Papan List, Balok, atau Kayu Gergajian Pendek dengan ketentuan ukuran sebagai berikut:

Tabel 1. Sortimen Kayu Gergajian

No	Sortimen	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Keterangan
1	Papan Lebar (Boards)	< 1/2 Lebar	≥ 10 cm	
2	Papan Lis (Strips)	< 1/2 Lebar	< 10 cm	
3	Broti (Scantings)	≥ 1/2 lebar	-	
4	Balok (Bauk)			Broti Berhati
5	Kayu Gergajian Pendek (Shorts)	-	-	Panjang < 1 m

Panjang ditulis dengan kelipatan 5 mm dan diukur pada bagian terpendek. Lebar dan tebal diukur dalam satuan mm atau cm. Pengukuran tebal dan lebar minimal 150 mm dari ujung kayu pada bagian tersempit dan tertipis. Volume dihitung dengan rumus:

$$vol = \frac{p \times l \times t}{10.000}$$

2. Pengisian Tabel ukuran di dokumen

Pengisian ukuran di dokumen berprinsip bahwa kayu tidak boleh kurang, harus pada batas toleransi dimana toleransi untuk kayu gergajian adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Toleransi Kayu Gergajian

Ukuran Baku	Toleransi	
	Kayu Selain Jati	Jati
Tebal	≤ 5 mm	≤ 5 mm
Lebar	≤ 5 mm	≤ 5 mm
Panjang	≤ 50 mm	≤ 30 mm

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang petani hutan rakyat, para petani mengatakan bahwa mereka tidak menguasai kaidah pengukuran untuk pengisian dalam dokumen jenis maupun toleransi. Sehingga penggunaan blanko Daftar Kayu Bulat/Daftar Kayu Olahan sangat membantu masyarakat dalam mengetahui alur Penatausahaan Hasil Hutan Hak. Blanko Daftar Kayu Bulat/Daftar Kayu Olahan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Blanko Daftar Kayu Bulat/daftar Kayu Olahan

Surat Angkutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SAKR adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak. Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani, kendala yang dirasakan adalah sulitnya melakukan pengisian dokumen tersebut. SAKR dibuat 2 rangkap: Lembar 1 bersama dengan alat angkut, lembar 2 arsip. Pengadaan dokumen boleh dengan fotocopy.

Penentuan Jarak tempuh dan waktu tempuh harus dihitung agar tidak ada penyelewengan dokumen. Contoh dokumen SAKR dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6. Surat Angkutan Kayu Rakyat

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Hutan Hak sangat sederhana dari segi aturan dimana petani hutan hak tidak memerlukan Surat Ijin Penebangan.
2. Petani hutan hak belum menggunakan dokumen SAKR seperti yang diharapkan dalam penjualan hasil hutan kayu karena kurangnya pengetahuan petani mengenai tata cara teknis perhitungan kayu dan pengisian Dokumen.
3. Pengetahuan yang perlu dimiliki oleh petani kayu pada hutan hak adalah: Perhitungan Volume Pohon Berdiri, Perhitungan Kayu Bulat, Perhitungan Kayu Olahan dan tata cara pengisian dokumen.
4. Dukungan teknis dan informasi pasar untuk petani hutan hak dari penyuluh masih kurang.

B. Rekomendasi

Peran Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) adalah melindungi kepentingan para petani Hutan Hak karena Dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) merupakan dokumen angkutan dan bukti asal usul kayu hutan hak dalam sistem PUHH. Oleh karena itu, para petani perlu memahami Penatausahaan Hasil Hutan.

Peran penyuluh sangatlah penting dalam membimbing kegiatan PUHH Hutan Hak di lapangan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pembinaan teknis, pelatihan, serta sosialisasi peraturan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikoordinasikan antara widyaiswara, penyuluh dan para pemangku kepentingan antara lain dengan memperbanyak praktik pada kegiatan pelatihan agar tingkat pemahaman para petani meningkat. Selain itu, petani hutan hak perlu difasilitasi oleh Dinas Kehutanan untuk memasok bahan baku kayu ke industri yang menerima kayu dari kayu yang berasal dari hutan hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2009. *Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Kehutanan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Anonimous. 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Anonimous. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- BNSP. 2020. *Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: 8911:2020 tentang pengukuran dan penetapan isi kayu bundar*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional Indonesia.
- Darusman, D. & Wijayanto, N. 2007. *Aspek Ekonomi Hutan Rakyat (Skim Pendanaan) Makalah pada Stadium General Pekan Hutan Rakyat II*. Bogor: Pusat Penelitian Hutan Tanaman.
- Effendi, R. 2010. *Kajian Tata Niaga Kayu Rakyat di Pulau Jawa Bagian Barat*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Pusat.
- Kemenhut. 2003. *Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.126/Menhut-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Kemenhut. 2012. *Keputusan Menteri Kehutanan No. 30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak*. Jakarta.
- KemenLHK. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi*. Jakarta.
- Musdi, Hardjanto & Sudarwati, L. 2021. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi petani hutan rakyat jati di Kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 123-135.
- Sarosa, S. 2017. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Edisi 2*. Jakarta: PT. Indeks.
- Syahadat, E. & Sabarudin. 2014. *Kajian Kebijakan Penatausahaan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak*. Bogor: Pusat penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.



*"Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan,
demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan"*

❧ Peribahasa Cina ❧



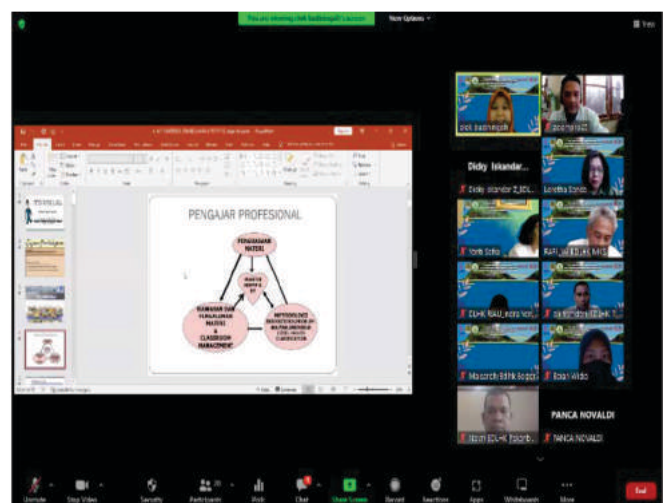
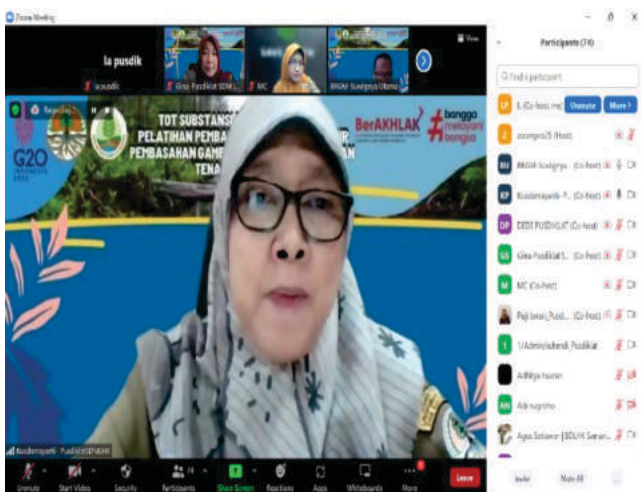
TRAINING OF TRAINERS (TOT) SUBSTANSI PELATIHAN

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengajar/widyaiswara, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan ToT Substansi Pelatihan dilaksanakan secara jarak jauh (*online*) dengan menggunakan *Learning Management System* (LMS) Pusat Diklat SDM LHK, antara lain:

- ToT Substansi Pelatihan Kewirausahaan bagi Guru SMK Kehutanan, dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 28 April 2022 dengan peserta sebanyak 34 orang yang berasal dari guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- ToT Substansi Pelatihan Teknis Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut bagi Masyarakat dan Tenaga Lapangan, dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 21 Mei 2022 dengan peserta sebanyak 50 orang yang berasal dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Widyaiswara Pusat Diklat SDM LHK serta Balai Diklat LHK.



ToT Kewirausahaan



ToT Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut

PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK UNTUK BUDIDAYA MAGGOT *BLACK SOLDIER FLY* (BSF)

Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Untuk Budidaya *Maggot Black Soldier Fly* (BSF) diselenggarakan di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 25 Juli s.d. 27 Juli 2022. Tujuan pelatihan ini adalah agar peserta diharapkan mampu melakukan pengolahan sampah organik untuk budidaya *Maggot Black Soldier Fly* (BSF) dalam rangka menciptakan kelompok masyarakat profesional yang kreatif sehingga mampu berwirausaha hijau. Selain mendapatkan manfaat secara ekonomi, masyarakat juga turut melakukan upaya pengolahan sampah, khususnya sampah organik. Pelatihan dilaksanakan secara klasikal dan diikuti oleh 40 (empat puluh) masyarakat yang berasal dari 6 (enam) kecamatan di Kota Bogor. Setelah penjelasan Program dan Alur Pelatihan, peserta pelatihan diberikan materi Pengolahan Sampah Organik untuk Pakan *Maggot Black Soldier Fly* (BSF), Budidaya *Maggot Black Soldier Fly* (BSF) dengan pakan sampah organik, dan Pasca Budidaya *Maggot Black Soldier Fly*. Jumlah jam pelatihan adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) JP yang terdiri dari 10 (sepuluh) JP Teori dan 24 (dua puluh empat) JP Praktik.



PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN (GANIS-PH)

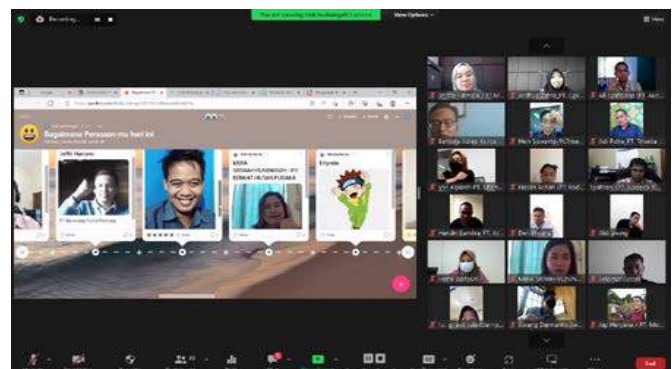
Guna memenuhi kebutuhan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANIS-PH) yang memiliki kompetensi kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi GANIS-PH, maka perlu dilakukan Pelatihan yang berbasis kompetensi GANIS-PH guna membekali peserta pelatihan untuk dapat memperoleh status sebagai profesi GANIS-PH melalui Uji Kompetensi.

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), menyelenggarakan Pelatihan Ganis PH, antara lain:

1. Pelatihan Ganis PH Pembinaan Hutan (Binhut)

Pusat Diklat SDM LHK menyelenggarakan Pelatihan Ganis PHPL Pembinaan Hutan yang bertujuan agar peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melaksanakan tugas sebagai GANIS-PH Pembinaan Hutan.

Pelatihan diikuti 40 (empat puluh) peserta dan diselenggarakan selama 28 (dua puluh delapan) hari dari tanggal 30 Mei s.d 7 Juli 2022 menggunakan *Learning Management System* (LMS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi pelaksanaan tugas GANIS-PH Pembinaan Hutan yang akan menunjang keberhasilan pengelolaan hutan melalui kegiatan pembinaan hutan.



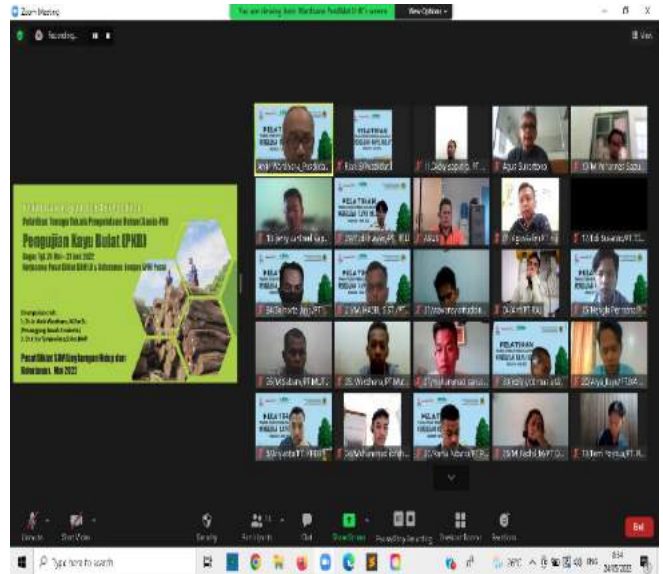
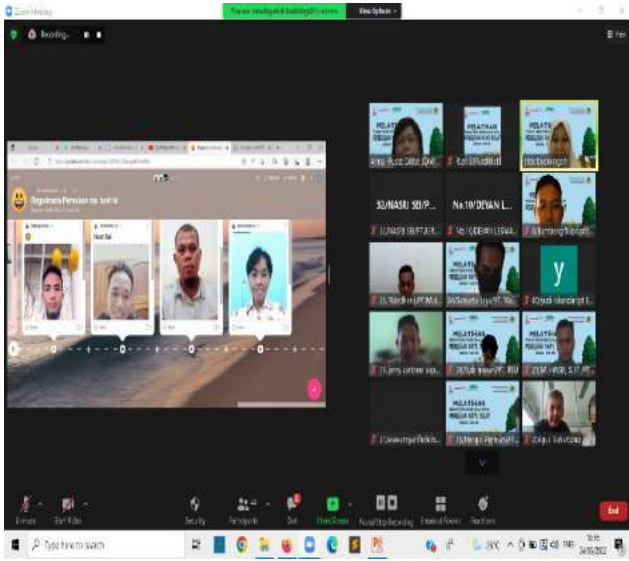
2. Pelatihan Ganis PH Pengujian Kayu Bulat (PKB)

Penyelenggaraan Pelatihan Ganis PH Pengujian Kayu Bulat bertujuan agar peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melaksanakan tugas sebagai GANIS-PH Pengujian Kayu Bulat.

Pelatihan ini diharapkan dapat membekali peserta mengenai kebijakan pengelolaan hutan produksi lestari, kebijakan sertifikasi GANIS-PH, menetapkan/ pengenalan jenis kayu, menetapkan isi (volume) kayu bulat besar dan sedang, menetapkan isi (volume) kayu bulat kecil, menetapkan sortimen kayu bulat, menetapkan mutu penampilan kayu bulat, dan melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

Pelatihan Ganis PH PKB dilaksanakan di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan APHI Pusat. Peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang yang berasal dari 16 (enam belas) perusahaan pemegang IUPHHK di provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pelatihan ini diselenggarakan selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 2 Juni s.d 20 Juni 2022 dengan menggunakan *Learning Management System* (LMS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada situs elearning.menlhk.go.id. Untuk materi praktik, para peserta yang berasal dari perusahaan yang sama dipandu oleh mentor melakukan praktik secara mandiri dan kemudian membuat video praktik pelatihan.



3. Pelatihan Ganis PH Perencanaan Hutan (Canhut)

Pusat Diklat SDM LHK bekerjasama dengan APhi menyelenggarakan Pelatihan GANIS PH Perencanaan Hutan (Canhut) dengan tujuan agar peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melaksanakan tugas sebagai GANIS Perencanaan Hutan.

Materi yang diberikan kepada peserta terdiri dari penerapan teknologi informasi berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG), penyusunan rencana inventarisasi hutan, melaksanakan inventarisasi hutan, menyusun laporan hasil inventarisasi hutan, menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang pemanfaatan hasil hutan kayu, dan menyusun rencana tahunan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Pelatihan ini diselenggarakan dari tanggal 14 Juni s.d 1 Agustus 2022 dengan menggunakan *Learning Management System (LMS) KLHK* pada situs elearning.menlhk.go.id. Untuk materi praktik, para peserta yang berasal dari perusahaan yang sama dipandu oleh mentor melakukan praktik secara mandiri dan kemudian membuat video praktik pelatihan.



PELATIHAN INTERPRETER WISATA ALAM

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi berupa sumberdaya alam yang berlimpah, baik di daratan, udara maupun di perairan. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam. Salah satu bentuk upaya mengantisipasi peluang-peluang wisata alam adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan obyek wisata alam yang memiliki daya tarik dan pengembangan produk wisata alam tersebut.

Guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas pengunjung diperlukan pemahaman terkait objek, atraksi dan tata cara pemanfaatan obyek wisata alam tersebut melalui seorang intrepeter. Seorang interpreter menginformasikan dan menginspirasi pengunjung sehingga pengunjung merasa puas dan juga berpartisipasi dalam melestarikan alam dan budaya yang ada.

Pelatihan ini dilaksanakan untuk membekali peserta dengan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi objek interpretasi, menyusun program interpretasi wisata alam, melakukan interpretasi wisata alam dan melakukan pengamanan pengunjung.

Pelatihan ini diselenggarakan secara *blended learning* pada tanggal 14 Juni s.d 18 Juni 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari KPH Rinjani Barat dan KPH Batulanteh. Pembelajaran secara *online* menggunakan *Learning Management System* (LMS) KLHK pada situs elearning.menlhk.go.id. Untuk pembelajaran praktik dilaksanakan secara *onsite* di KPH Rinjani Barat dan KPH Batulanteh.



WORKSHOP PENYUSUNAN PANDUAN COACHING DAN MENTORING

Keberhasilan suatu organisasi ditunjang oleh sumber daya manusia yang kompeten. Bentuk pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan pelatihan merupakan bentuk pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan secara klasikal maupun non klasikal. Pelatihan klasikal dapat dilakukan melalui pelatihan manajerial, sosial kultural, teknis, *workshop*, dan lain-lain yang pada dasarnya mengumpulkan peserta pada ruang dan waktu tertentu untuk melakukan tatap muka di kelas. Sementara pelatihan non klasikal lebih menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja atau pembelajaran di luar kelas. Bentuk pengembangan kompetensi non klasikal diantaranya adalah kegiatan *coaching*, *mentoring*, belajar mandiri, dan sebagainya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mengembangkan kompetensi ASN sekaligus sebagai wujud pengembangan karir ASN adalah *coaching* dan *mentoring*.

Coaching merupakan salah satu alternatif pengembangan kompetensi pegawai melalui bentuk/jalur Pelatihan non Klasikal. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. *Coaching* selain memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan kompetensi pegawai juga merupakan media untuk mempererat hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian, melalui *coaching* dapat terwujud kerja sama yang solid dan sinergis, dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Mentoring merupakan pembimbingan peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama, atau dengan kata lain *mentoring* adalah sebuah kegiatan pendampingan.

Pusat Diklat SDM LHK bekerjasama dengan *Wildlife Conservation Society* (WCS) menyelenggarakan *workshop* penyusunan panduan *coaching* dan *mentoring* untuk pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Workshop* dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 21 Juni s.d 22 Juni 2022 di Hotel Pajajaran Bogor dengan narasumber dari Kemendikbudristek dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). *Workshop* dibuka oleh Kepala Pusat Diklat SDM LHK dengan peserta *workshop* adalah Widyaiswara, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), penyuluh lingkungan hidup, penyuluh kehutanan, pengembang teknologi pembelajaran, analis kepegawaian dan pelaksana lingkup Kementerian LHK.





PELATIHAN PEMBENTUKAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)



Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) merupakan jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) menyelenggarakan Pelatihan Pembentukan Pejabat Fungsional PEDAL secara jarak Jauh (*e-learning*) Tahun 2022 sebanyak 1 Angkatan dari tanggal 17 Mei s.d 31 Mei 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.



WORKSHOP PENGEMBANGAN SMK KEHUTANAN TAHUN 2022

Pusat Diklat SDM LHK menyelenggarakan *Workshop* Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan tahun 2022 dari tanggal 13 Juli s.d. 15 Juli 2022 di Hotel Permata Bogor. *Workshop* dibuka oleh Plt. Kepala BP2SDM, Ibu Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si. Kegiatan *Workshop* ini diikuti oleh sekitar 33 SMK Kehutanan dari seluruh Indonesia, baik SMK Kehutanan Negeri maupun SMK Kehutanan Swasta.

Tujuan *workshop* ini adalah untuk menghasilkan suatu rumusan untuk pengembangan SMK Kehutanan dan memajukan Pendidikan kejuruan kehutanan di Indonesia. *Workshop* ini juga membahas implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran baru 2022/2023 dan sebagai ruang diskusi antar guru SMK seperti praktik industri, pola pembelajaran, pembentukan karakter peserta didik, pengembangan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan, serta serapan kerja alumni dan hal lain terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kejuruan kehutanan.



PENGUKUHAN WIDYAISWARA AHLI UTAMA

Pada tanggal 22 Juni dan 23 Juni 2022, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menyelenggarakan kegiatan Orasi Ilmiah sekaligus Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama oleh Kepala LAN Bapak Dr. Adi Suryanto, M.Si.



Bapak Budi Zet Mooy, STP, M.Sc merupakan salah satu Widyaiswara Ahli Utama Pada Balai Diklat LHK Kupang, telah melaksanakan orasi ilmiah dengan judul KTI "Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Produksi Madu Lebah Hutan (*Apis dorsata*) KHDTK Diklat Sisimani Sanam, Kabupaten Kupang". Acara Orasi dihadiri oleh Ketua Majelis Orasi yaitu Kepala Pusbin JF Bangkom ASN LAN, Ibu Erfi Muthmainah, SS, MA dan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Ibu Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si sebagai Anggota Tim Majelis.



Selamat kepada Bapak Budi Zet Mooy, STP, M.Sc., semoga hasil Penelitian KTI dapat bermanfaat bagi pengembangan kediklatan.

APEL PAGI PUSAT DIKLAT SDM LHK



Pusat Diklat SDM LHK kembali mengadakan kegiatan Apel Pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin dan diikuti oleh seluruh pegawai. Kegiatan Apel Pagi ini sempat terhenti karena pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 sampai dengan Mei 2022. Pembina Apel Pagi adalah Kepala Pusat Diklat SDM LHK, Koordinator Widyaiswara, Koordinator Tim Kerja dan Widyaiswara Ahli Utama.

Apel pagi merupakan ajang pertemuan untuk menyampaikan arahan Kepala Pusat Diklat SDM LHK dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Pusdiklat SDM LHK yang akan berlangsung, serta untuk menjalin silaturahmi antar pegawai.

Protokol Kesehatan Pencegahan Covid 19 tetap diberlakukan saat pelaksanaan Apel Pagi.



PURNA BAKTI



Beberapa staf dan Widyaiswara telah memasuki masa purna bakti pada periode Mei s.d Agustus 2022. Terima kasih atas jasa-jasanya dalam mengembangkan dan memajukan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga.



*"Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita akan hari ini.
Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat"*

❧ Franklin Roosevelt ❧



BERITA DUKA CITA

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Turut berduka cita atas meninggalnya :



Ir. Hambali
bin
H. Solihin


Bogor, 20 Juni 2022

"Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan"

Kami yang berduka
Keluarga Besar Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Inna Lillahi wa Inna ilaihi raji'un



Ir. Slamet Sutiyanto, M.Si
Bogor, 31 Agustus 2022

Turut Berduka Cita atas Meninggalnya
Bpk. Slamet Sutiyanto semoga amal ibadah
beliau diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang
ditinggalkan di beri ketabahan.

kami yang berduka:
Keluarga Besar Pusdiklat SDM LHK

PETUNJUK PENULISAN

- Naskah dapat berupa **Karya Tulis Ilmiah (KTI)** atau **Artikel**.
- Tulisan merupakan karya **orisinal** penulis (bukan plagiasi) dan belum pernah dipublikasikan atau sedang dalam proses publikasi pada media lain.
- **KTI**
Tema disarankan relevan dengan lingkup kediklatan, walaupun menerima tulisan dengan tema lain mengenai Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- **Artikel**
Tema adalah isu populer terkait isu Lingkungan, Kehutanan, atau kediklatan.

KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

Aturan penulisan adalah sebagai berikut :

- a. Pada sudut kanan atas ditulis KTI
- b. **Naskah** terdiri dari 8-15 halaman, spasi 1,5 ukuran kertas A4 dengan margin 3 cm pada semua tepi kertas dan jenis huruf Calibri font 12.
- c. **Judul** harus jelas dan menggambarkan isi tulisan, ringkas, ditulis dengan huruf kapital, diposisikan di tengah.
- d. **Nama penulis**, ditulis dibawah judul dan dicantumkan tanpa gelar, serta dicantumkan jabatan dan asal instansi
- e. **Abstrak/abstract**, ditulis dalam bahasa inggris, maksimal 200 kata, berisi intisari permasalahan, metode, hasil dan kesimpulan penting yang diperoleh. Abstrak ditulis tanpa acuan atau kutipan pustaka, dan tanpa singkatan/akronim.
- f. **Kata Kunci/Keywords**, ditulis di bawah abstrak dan terdiri dari 3-5 kata
- g. **Penomoran Tubuh naskah**, diatur dalam Bab dan Sub bab secara konsisten, seperti:
I, II, III, dst untuk Bab
A, B, C, dst untuk Sub bab
1,2,3,dst untuk Sub subbab
a,b,c,dst untuk Sub sub subbab

Tata urutan penulisan untuk hasil penelitian

- Judul
 - Nama Penulis
 - Jabatan dan asal instansi
 - Abstrak
 - Kata Kunci
 - Tubuh Naskah :
- I. Pendahuluan
Memuat latar belakang, alasan memilih topik, uraian singkat terkait masalah yang diambil/ rumusan masalah, pembahasan terkait ruang lingkup, dan tujuan permasalahan yang mengarah kepada solusi yang diberikan.
 - II. Metode Penelitian
Memuat prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah, diantaranya jenis penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data
 - III. Hasil dan Pembahasan
Memuat landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan, pembahasan hasil pengolahan data dan analisis data/ analisis kasus

- IV. Kesimpulan dan Rekomendasi
Memuat kesimpulan akhir apakah penelitian yang dilakukan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkat serta perlu memberikan penjelasan terkait saran dan harapan kedepannya.

Daftar Pustaka

Tata urutan penulisan untuk non hasil penelitian (tinjauan, ulasan (review), kajian, dan pemikiran sistematis

Judul
Nama Penulis
Jabatan dan asal instansi
Abstrak
Kata Kunci

- I. Pendahuluan (mengandung latar belakang masalah, rumusan/identifikasi masalah, tujuan)
II, III, IV dst. (Bab-bab inti naskah)
Nomor Bab terakhir: Kesimpulan dan Rekomendasi

Daftar Pustaka

Tabel, Gambar/Grafik

diberi nomor dan keterangan serta dijelaskan dalam naskah.

Daftar Pustaka

- Penulisan referensi diselipkan secara otomatis dalam naskah yang ditulis dengan MS Word.
- *Style* penulisan referensi antara lain: APA fifth edition, Harvard dll.
- Merupakan referensi yang dirujuk dalam naskah. Pustaka berasal dari buku, jurnal, prosiding, dokumen dan internet. Situs personal seperti Blog yang tidak jelas status nilai ilmiahnya tidak dapat dijadikan sebagai sumber pustaka.

Redaktur berhak memperbaiki isi naskah yang diterima dan bagi artikel yang tidak memenuhi syarat sebagai KTI, tetap akan dimuat sebagai artikel umum.

Artikel

Aturan penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Pada sudut kanan atas ditulis Artikel.
- b. Naskah terdiri dari 8-15 halaman, spasi 1,5 ukuran kertas A4 dengan margin 3 cm pada semua tepi kertas dan jenis huruf Calibri font 12.
- c. Judul harus jelas dan menggambarkan isi tulisan, ringkas, ditulis dengan huruf kapital, diposisikan di tengah.
- d. Nama penulis, ditulis dibawah judul dan dicantumkan tanpa gelar, serta dicantumkan jabatan dan asal instansi.
- e. Tabel, Gambar/Grafik diberi nomor dan keterangan serta dijelaskan dalam naskah.

Artikel/naskah dikirim ke **Redaksi**
Majalah Silvika melalui email:
majalahsilvika@gmail.com

Tekadku Pengabdian Terbaik




PUSAT DIKLAT SDM LHK

Jln.mayjen Ishak Jursa, Gunung Batu Kotak Pos 141- Bogor16118

Telp.(0251)8313622,8337742,Fax.(0251)8323565

e-mail:majalahsilvika@gmail.com

 <http://pusdiklat.bp2sdm.menlhk.go.id>

 Pusdiklat Sdm Lhk

 @pusdiklatsdmlhk



Edisi 106 / April / 2022



9 770215 723001



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105057951